

ANALISIS ICOR SEKTORAL

Daerah Istimewa Yogyakarta

2011-2015



KERJA SAMA
BADAN PUSAT STATISTIK
DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2016

jogja

istimewa



**ANALISIS ICOR SEKTORAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2011-2015**

**KERJASAMA BADAN PUSAT STATISTIK DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Dalam perencanaan pembangunan wilayah, pemerintah pada umumnya telah menentukan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai. Salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Perkembangan suatu sektor ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan peningkatan investasi yang ditanamkan pada sektor tersebut. Kegiatan investasi akan meningkatkan kapasitas produksi dan pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Penyusunan publikasi Analisis *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Sektoral Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015 bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan barang modal dalam proses produksi pada masing-masing sektor ekonomi. berdasarkan angka ICOR menurut sektor, maka dapat diestimasi kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan tertentu. Publikasi ini ini dapat terwujud berkat kerjasama antara BPS dengan BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saran dan kritik perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi sejenis pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih.

Bantul, Mei 2016

Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,



Y. Bambang Kristianto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Dasar Pelaksanaan	6
1.3. Ruang Lingkup.....	7
1.4. Maksud dan Tujuan.....	7
1.5. Sasaran dan Keluaran	8
1.6 Pembiayaan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Pengertian ICOR.....	10
2.2. Pengertian Investasi.....	14
2.2.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	15
2.2.2. Perubahan Inventori	18
2.3. Pengertian Output	19
2.4. Pengertian Nilai Tambah.....	20
2.5. Penelitian Terdahulu	21
BAB III. METODOLOGI.....	25
3.1. Sumber Data	25

3.2. Estimasi PMTB menurut Lapangan Usaha	25
3.3. Penghitungan Pertambahan Output menurut Lapangan Usaha	26
3.4. Metodologi Penghitungan ICOR	26
3.4.1. Metode Standar	26
3.4.2. Metode Akumulasi Investasi.....	28
3.4.3. <i>Time Lag</i> Investasi.....	28
3.4.4. Koefisien ICOR Negatif	29
3.4.5. Koefisien ICOR yang Besar dan Positif	29
3.4.6. Asumsi Dasar	30
3.5. Indeks Perkembangan	31
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Pertumbuhan Ekonomi	33
4.2. Perkembangan Nilai Investasi	38
4.3. Struktur Investasi	39
4.4. Angka ICOR Provinsi DIY.....	42
4.4.1. ICOR Total.....	42
4.4.2. ICOR menurut Lapangan Usaha	45
4.6. Kebutuhan dan Pilihan Investasi	58
4.5. Hubungan ICOR, GDI, GDS, LPE, dan Inflasi	65
BAB V. PENUTUP	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Rekomendasi	73
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 4.1.	Pertumbuhan Ekonomi DIY menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (%).....	35
Tabel 4.2.	Pertumbuhan PDRB DIY menurut Pengeluaran, 2011-2015 (%)	37
Tabel 4.3.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jabalnusra, 2011-2015 (%)	38
Tabel 4.4.	Perkembangan Nilai Investasi di DIY, 2010-2015 (Juta Rp.)	39
Tabel 4.5.	Nilai Investasi di DIY menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Berlaku, 2011-2015 (Juta Rupiah).....	41
Tabel 4.6.	Nilai Investasi di DIY menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Konstan 2010, 2011-2015 (Juta Rupiah)	42
Tabel 4.7.	ICOR Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2011-2015	44
Tabel 4.8.	ICOR Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2011-2015	44
Tabel 4.9.	ICOR Lapangan Usaha Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2011-2015	45
Tabel 4.10.	ICOR Lapangan Usaha Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan Pendekatan Investasi=PMTB, 2011-2015	47
Tabel 4.11.	ICOR di Provinsi Jabalnusra (Investasi = PMTB + Δ Inventori), 2011-2015	48
Tabel 4.12.	ICOR di Provinsi Jabalnusra (Investasi = PMTB), 2011-2015	49
Tabel 4.13.	ICOR Lapangan Usaha Metode Akumulasi, Lag=0 Dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori, 2011-2015	50
Tabel 4.14.	ICOR Lapangan Usaha Metode Standar, Lag=0 Dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori, 2011-2015	53
Tabel 4.15.	ICOR Lapangan Usaha Metode Standar Lag=0, Lag=1, dan Lag=2, dengan Pendekatan Investasi=PMTB + Perubahan Inventori, 2011-2015	54

Tabel 4.16.	ICOR Lapangan Usaha Metode Standar Lag=0, Lag=1, dan Lag=2, dengan Pendekatan Investasi=PMTB, 2011-2015 ..	55
Tabel 4.17.	ICOR Lapangan Usaha Metode Standar dan Akumulasi, Indeks Perkembangan Konstan, dan LPE Rata-rata, 2011-2015	57
Tabel 4.18.	Kebutuhan Investasi untuk Target Pertumbuhan Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016-2020.....	58
Tabel 4.19.	Kebutuhan Investasi untuk Target Pertumbuhan Kabupaten Kulonprogo, 2016-2020.....	59
Tabel 4.20.	Kebutuhan Investasi untuk Target Pertumbuhan Kabupaten Bantul, 2016-2020	59
Tabel 4.21.	Kebutuhan Investasi untuk Target Pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020.....	60
Tabel 4.22.	Kebutuhan Investasi untuk Target Pertumbuhan Kabupaten Sleman, 2016-2020	61
Tabel 4.23.	Kebutuhan Investasi untuk Target Pertumbuhan Kota Yogyakarta, 2016-2020	61
Tabel 4.24.	Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DIY Menurut Sektor, 2011-2015 (%).....	63
Tabel 4.25.	Sebaran Perusahaan/Usaha non-Pertanian di Provinsi DIY menurut Skala Usaha, 2006	64
Tabel 4.26.	Jumlah Perusahaan/Usaha menurut Kabupaten/Kota dan Skala Usaha di DIY, 2006 (Unit)	65
Tabel 4.27.	Hubungan ICOR, GDI, GDS, LPE dan Inflasi di Provinsi DIY, 2011-2015	67

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 4.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PMTB Provinsi DIY, 2011–2015 (%)	33
Gambar 4.2.	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (%)	34
Gambar 4.3.	Rata-rata Distribusi Persentase PDRB DIY menurut Pengeluaran, 2011-2015 (%)	36
Gambar 4.4.	Rata-rata Proporsi PMTB Terhadap Total Investasi DIY, 2011-2015	39
Gambar 4.5.	Struktur Investasi Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (%)	40
Gambar 4.6.	Struktur Investasi Menurut Kelompok Industri, 2011-2015 (%)	41
Gambar 4.7.	Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY, 2011-2015	43
Gambar 4.8.	Kesenjangan Investasi dan Tabungan	66
Gambar 4.9.	Perkembangan GDI dan GDS di Provinsi DIY, 2010-2015	68

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1.	PDRB Provinsi DIY atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (Juta Rupiah).....	80
Lampiran 2.	Distribusi Persentase PDRB Provinsi DIY atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (%)	81
Lampiran 3.	PDRB Provinsi DIY atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (Juta Rupiah)	82
Lampiran 4.	Distribusi Persentase PDRB Provinsi DIY atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (%) .	83
Lampiran 5.	PDRB Provinsi DIY atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2011-2015 (Juta Rupiah)	84
Lampiran 6.	Distribusi Persentase PDRB Provinsi DIY atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2011-2015 (%)	84
Lampiran 7.	PDRB Provinsi DIY atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2011-2015 (Juta Rupiah)	85
Lampiran 8.	Distribusi Persentase PDRB Provinsi DIY atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2011-2015 (%).....	85
Lampiran 9.	PMTB ± Perubahan Inventori, ICOR, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, 2015	86
Lampiran 10.	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2011-2015 (juta rupiah)	86
Lampiran 11.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi DIY 2011-2015, dan Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun 2011-2015 (persen)	87
Lampiran 12.	PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di Provinsi D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2015 (juta rupiah)	88
Lampiran 13.	Kontribusi Lapangan Usaha Dominan menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2011-2015 (persen).....	89
Lampiran 14.	Peta Rencana Kawasan Strategis di Provinsi D.I. Yogyakarta	90
Lampiran 15.	Peta Pengembangan Kawasan Sentra Produksi DIY	91



BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang*
- 1.2. Dasar Pelaksanaan*
- 1.3. Ruang Lingkup*
- 1.4. Maksud dan Tujuan*
- 1.5. Sasaran dan Keluaran*
- 1.6. Pembiayaan*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam setiap periode pemerintahan, telah ditetapkan target pertumbuhan ekonomi tertentu. Untuk mencapai target laju pertumbuhan tersebut diperlukan jumlah investasi yang sesuai. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan lebih banyak input dalam proses produksi.

Stok kapital merupakan determinan output perekonomian yang penting. Dalam model pertumbuhan Harrod-Domar dinyatakan bahwa output merupakan fungsi dari stok kapital dan tenaga kerja pada tingkat teknologi tertentu (Hess and Ross, 1997). Investasi akan meningkatkan stok capital, sedangkan depresiasi/penyusutan akan mengurangi stok kapital (Mankiw, 2007). Kenaikan stok kapital akan meningkatkan kapasitas suatu wilayah dalam proses penciptaan output perekonomian. Dengan demikian, investasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk merangsang investasi, pemerintah daerah perlu menciptakan agenda-agenda yang jelas dan komprehensif. Agenda-agenda dimaksud, antara lain: (i) merumuskan kebijakan investasi; (ii) memperbaiki peraturan dan regulasi; dan (iii) memperbaiki dukungan dan pelayanan birokrasi (*one-roof system* atau *one-stop shop*); (iv) mengembangkan promosi daerah; (v) mengembangkan kemitraan (*partnership*); (vi) mengembangkan regional management; (vii) mengembangkan *business networking*; dan (viii) mempertajam strategi belanja publik (Salim, 2010).

Kajian tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan oleh para ahli ekonomi. Keadaan ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena dan perkembangan teori yang memasukkan faktor eksternalitas berupa inovasi (*innovation*), teknologi (*technology*), kreativitas (*creativity*), jejaring (*networking*) dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, investasi yang meningkat pada gilirannya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Sutomo (2015) menyatakan bahwa *investment is the engine of economic growth*, dengan pengertian bahwa faktor produksi yang berperan dalam menghasilkan output adalah investasi fisik (*ceteris paribus*). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara kuliah umum dalam rangka peringatan dies natalis ITS ke-50 tanggal 14 Desember 2010, mengungkapkan bahwa ada dua hal yang menjadi penggerak dan mesin dalam menumbuhkan ekonomi Indonesia, yaitu inovasi dan teknologi. SBY menyatakan bahwa inovasi dan teknologi harus menjadi *driver* dan *engine*. Inovasi merupakan *engine of progress* sehingga akan menimbulkan perubahan. SBY juga menyebutkan bahwa potensi produksi kita terletak pada sumber daya manusia (SDM), modal, dan teknologi informasi.

Dalam Rakor SDM dan Iptek, Menristek menegaskan bahwa nilai ekonomi dari berbagai komoditi berbasis sumber daya alam cenderung mengalami penurunan relatif terhadap nilai ekonomi produk-produk dengan teknologi tinggi. Produk-produk tersebut dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apabila keadaan ini terus berlangsung, maka dalam jangka panjang bangsa Indonesia tidak akan mampu mengimbangi pembiayaan impor dengan pendapatan ekspor. Dengan demikian, kita juga harus mengakumulasi kapasitas iptek agar generasi penerus di masa mendatang dapat menghasilkan produk-produk teknologi yang mampu bersaing di pasar global untuk membiayai perkembangan dirinya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi investasi pada suatu daerah antara lain sebagai berikut:

1. **Tingkat bunga;** menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pemilik modal (investor) pada investor hanya akan menanamkan modalnya apabila tingkat pengembalian modal dari modal yang ditanamkan (*return of investment*), yaitu berupa persentase keuntungan netto (belum dikurangi dengan tingkat bunga yang dibayar) yang diterima lebih besar dari tingkat bunga. Seorang investor mempunyai dua pilihan di dalam menggunakan modal yang dimilikinya yaitu dengan meminjamkan atau membungakan uang tersebut (deposito), dan menggunakannya untuk investasi.
2. **Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan;** mengenai keuntungan di masa depan akan memberikan gambaran pada investor mengenai jenis usaha yang prospektif dan dapat dilaksanakan dimasa depan dan besarnya investasi yang

harus dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang diperlukan.

3. **Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.** Dengan bertambahnya pendapatan nasional maka tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, total *aggregat demand* meningkat yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain (*induced invesment*).
4. **Keuntungan yang diperoleh perusahaan,** maka akan mendorong para investor untuk menyediakan sebahagian dari keuntungan yang diperoleh untuk investasi-investasi baru.
5. **Situasi politik suatu negara;** akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor terutama pada investor asing, untuk menanamkan modalnya. Mengingat bahwa investasi memerlukan jangka waktu yang relatif lama untuk memperoleh kembali modal yang ditanam dan memperoleh keuntungan sehingga stabilitas politik jangka panjang akan sangat diharapkan oleh para investor.
6. **Kemajuan teknologi,** dengan adanya temuan-temuan teknologi baru (inovasi), maka akan semakin banyak kegiatan pembaharuan yang akan dilakukan oleh investor, sehingga semakin tinggi tingkat efisiensi dari investasi yang dilakukan.
7. **Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah,** tersedianya berbagai sarana dan prasarana awal, seperti jalan raya, listrik dan sistim komunikasi akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Disamping itu adanya bentuk insentif yang diberikan pemerintah seperti keringanan-keringanan di dalam perpajakan (*tax holiday*) yaitu suatu keringanan di dalam pembebanan pajak yang diberikan kepada suatu perusahaan yang mau menanamkan modalnya.
8. **Kualitas sumber daya manusia;** Manusia yang berkualitas memiliki daya tarik investasi cukup penting sebab teknologi yang digunakan bagi pengusaha sangat modern sehingga menuntut ketrampilan yang lebih dari tenaga kerja.
9. **Kualitas sumber daya alam dan energi;** adanya sumber daya alam yang melimpah di suatu daerah akan mengundang investor untuk masuk ke daerah tersebut karena keunggulan komparatifnya. Selain itu, ketersediaan energi yang cukup memadai akan merupakan insentif bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Kecukupan energi baik energi listrik maupun bahan bakar lainnya merupakan syarat utama karena hampir semua proses produksi mensyaratkan kebutuhan energi yang cukup.

Untuk mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan yang terkait dengan investasi dapat digunakan indikator *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*. Nilai ICOR menunjukkan jumlah investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan tambahan kapital dengan tambahan output. ICOR tersebut digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi. Jika koefisien ICOR bernilai negatif atau nilai relatif besar dapat menunjukkan bahwa terjadi *inefficiency* dalam investasi. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil. Namun demikian, untuk menilai tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah apakah bersifat *capital intensive* atau *labor intensive*.

Widodo (1990) menyatakan bahwa, produktivitas investasi dapat dikatakan baik apabila nilai ICOR berada pada kisaran 3 – 4. Semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi terjadi akibat adanya perbaikan teknologi, sehingga semakin rendah ICOR maka penggunaan modal semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1988).

Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah sangat diperlukan investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Informasi mengenai keterkaitan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai ICOR. Kajian mengenai ICOR menjadi sangat penting dan menarik untuk mendorong peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang akan berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi. Kajian tentang ICOR diharapkan dapat mengetahui penyebab tingginya angka ICOR, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi bahan kebijakan yang tepat dalam rangka mendorong investasi yang akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.

1.2. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Kepala BPS Nomor 106 Tahun 2014 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2016;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BAPPEDA DIY Nomor: 7/DPA/2016.

1.3. Ruang Lingkup

1.3.1. Lingkup Materi

Lingkup kegiatan Analisis ICOR Sektoral DIY 2011-2015 meliputi:

1. ICOR sektoral DIY dan ICOR agregat Kabupaten/Kota
2. Tahun data aktual 2011-2015 dan data proyeksi 2016-2020

1.3.2. Lingkup Wilayah

Penyusunan ICOR Sektoral mencakup seluruh wilayah DIY.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari pekerjaan Analisis ICOR Sektoral DIY 2011-2015 adalah untuk menyediakan kajian kebutuhan dan alokasi investasi menurut wilayah maupun menurut sektor sehingga bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan DIY.

1.4.2. Tujuan

Tujuan pekerjaan Analisis ICOR Sektoral DIY 2011-2015, antara lain untuk:

- a. Menghitung tingkat investasi fisik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Menyediakan angka ICOR Sektoral tingkat Provinsi dan ICOR Agregat Kabupaten/kota;
- c. Menyediakan hasil analisis deskriptif ICOR Sektoral tingkat Provinsi dan ICOR Agregat Kabupaten/kota;
- d. Memperkirakan kebutuhan tambahan investasi baru berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota;
- e. Menyediakan rekomendasi sebagai bahan kebijakan dan perencanaan bidang investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

1.5. Sasaran dan Keluaran

1.5.1. Sasaran

Tersusunnya dokumen Analisis ICOR Sektoral DIY 2011-2015

1.5.2. Keluaran

Dokumen hasil Analisis ICOR Sektoral DIY 2011-2015 yang mencakup:

- a. Perhitungan tingkat investasi fisik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Angka ICOR Sektoral tingkat Provinsi dan ICOR Agregat Kabupaten/kota;
- c. Hasil analisis ICOR Sektoral tingkat Provinsi dan ICOR Agregat Kabupaten/kota;
- d. Perkiraan kebutuhan tambahan investasi baru berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota;
- e. Rekomendasi sebagai bahan kebijakan bidang investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

1.6. Pembiayaan

Sumber dana pelaksanaan pekerjaan Analisis ICOR Sektoral DIY 2011-2015 dibebankan pada APBD DIY Tahun Anggaran 2016 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian ICOR

2.2. Pengertian Investasi

2.2.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

2.2.2. Perubahan Inventori

2.3. Pengertian Output

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian ICOR

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) memiliki peranan yang penting dalam teori ekonomi. ICOR atau rasio kenaikan output akibat kenaikan kapital adalah indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menilai kinerja investasi di suatu negara. Kegunaan lainnya adalah untuk menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan agar perekonomian tumbuh dengan laju yang sudah ditetapkan.

ICOR adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Nilai ICOR diperoleh dari perbandingan antara besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal). Tambahan kapital diperoleh dari investasi. ICOR juga dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai.

Secara teoritis hubungan ICOR dengan pertumbuhan ekonomi dikembangkan pertama kali oleh **R.F. Harrod** dan **Evsey Domar**. Profesor Evsey Domar, seorang ekonom Amerika Serikat (1939) dan Sir Roy Harrod, seorang ekonom Inggris (1947), mengembangkan suatu koefisien yang diturunkan dari suatu rumus tentang pertumbuhan ekonomi. Namun karena kedua teori tersebut banyak kesamaannya, maka kemudian teori tersebut lebih dikenal sebagai teori Harrod-Domar. Koefisien itu mengaitkan pertambahan kapasitas terpasang (*capital*) dengan pertumbuhan ekonomi (output).

Beberapa asumsi dalam teori Harrod – Domar adalah sebagai berikut:

- a. Perekonomian dalam pengerjaan penuh dan barang-barang modal dalam masyarakat digunakan sepenuhnya.
- b. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Ini berarti dalam analisis dianggap tidak terdapat sektor pemerintah dan sektor luar negeri.

- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah merupakan fraksi tertentu dari besarnya pendapatan nasional. Ini berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan masyarakat untuk menabung (*marginal propensity to save* = MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal – output (*capital output ratio* = COR) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital output ratio* = ICOR).

Dalam model pertumbuhan Harrod – Domar mencakup persamaan sebagai berikut (Hess and Ross, 1997):

$$H1) \quad K = vY \quad \dots\dots\dots (2.1)$$

$$H2) \quad L = uY \quad \dots\dots\dots (2.2)$$

$$H3) \quad I = S \quad \dots\dots\dots (2.3)$$

$$H4) \quad S = sY \quad \dots\dots\dots (2.4)$$

$$H5) \quad \Delta L/L = n \quad \dots\dots\dots (2.5)$$

Berdasarkan persamaan (2.1) dan (2.2) dapat dirumuskan persamaan fungsi produksi sebagai berikut:

$$Y = A \min (K/v, L/u) \quad \dots\dots\dots (2.6)$$

keterangan:

- Y = output
- A = teknologi
- K = stok kapital
- L = jumlah tenaga kerja
- I = investasi
- S = jumlah tabungan
- v = rasio kapital-output
- u = rasio tenaga kerja-output
- s = tingkat tabungan
- n = tingkat pertumbuhan tenaga kerja alami

Dengan asumsi $A = 1$, maka untuk memperoleh perubahan output sebesar ΔY diperlukan perubahan input sebagai berikut:

$$H1') \quad \Delta K = v\Delta Y \quad \dots\dots\dots (2.7)$$

$$H2') \quad \Delta L = u\Delta Y \quad \dots\dots\dots (2.8)$$

Dengan membagi persamaan (2.7) dengan (2.1) dan persamaan (2.8) dengan (2.2) akan diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\Delta K/K = v\Delta Y/vY = \Delta Y/Y \dots\dots\dots (2.9)$$

$$\Delta L/L = u\Delta Y/uY = \Delta Y/Y \dots\dots\dots (2.10)$$

keterangan:

$\Delta Y/Y$ = laju pertumbuhan output

$\Delta K/K$ = laju pertumbuhan kapital

$\Delta L/L$ = laju pertumbuhan tenaga kerja

Dalam perekonomian sederhana tanpa campur tangan pemerintah dan perdagangan luar negeri, pada kondisi keseimbangan pasar barang maka $I = S$. Tabungan diperoleh dari output yang tidak dikonsumsi. Dengan demikian, Investasi adalah bagian output yang tidak dikonsumsi.

Dari persamaan (2.3), (2.4), dan (2.7) dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\Delta K = I = S = sY \dots\dots\dots (2.11)$$

$$v\Delta Y = \Delta K = I = S = sY \dots\dots\dots (2.12)$$

$$v\Delta Y = sY \dots\dots\dots (2.13)$$

$$v\Delta Y/vY = sY/vY \dots\dots\dots (2.14)$$

$$\Delta Y/Y = s/v \dots\dots\dots (2.15)$$

Beberapa kelemahan dari Teori Harrod – Domar adalah sebagai berikut:

- a. Anggapan bahwa MPS dan ICOR konstan adalah anggapan yang terlalu kaku mengingat dalam jangka panjang mungkin sekali kedua variabel tersebut berubah.
- b. Teori Harrod – Domar beranggapan proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tetap. Anggapan ini tidak dapat dipertahankan mengingat pada kenyataannya hubungan antara tenaga kerja dan modal tidak selalu dalam proporsi yang tetap.
- c. Model Harrod – Domar mengabaikan perubahan-perubahan harga pada umumnya. Padahal perubahan harga selalu terjadi di setiap waktu dan sebaliknya dapat mengendalikan situasi ekonomi yang tidak stabil.

- d. Asumsi bahwa suku bunga tidak berubah adalah tidak relevan dengan analisis yang bersangkutan. Suku bunga dapat berubah dan pada akhirnya akan mempengaruhi investasi.

Pada dasarnya teori tentang ICOR dilandasi oleh dua macam konsep yaitu:

- (i) **Rasio Modal – Output** atau **Capital Output Ratio (COR)** atau sering disebut sebagai **Average Capital Output Ratio (ACOR)**, yaitu perbandingan antara modal yang digunakan dengan output yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. COR atau ACOR ini bersifat statis karena hanya menunjukkan besaran yang menggambarkan perbandingan modal dan output.
- (ii) **Rasio Modal – Output Marginal** atau **Incremental Capital Output Ratio (ICOR)**, yaitu suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan modal (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output baik secara fisik maupun secara nilai (uang). Konsep ICOR ini lebih bersifat **dinamis** karena menunjukkan perubahan /penambahan output sebagai akibat langsung dari penambahan modal.

Dari pengertian pada butir (ii), maka ICOR bisa diformulasikan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \dots\dots\dots (2.16)$$

keterangan:

ΔK = investasi, atau penambahan barang modal baru/kapasitas terpasang

ΔY = pertambahan output

Contoh:

Diketahui bahwa koefisien ICOR di suatu daerah sebesar 5. Artinya untuk meningkatkan output satu unit diperlukan investasi sebesar 5 unit. Jika output di daerah itu pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 4 miliar, maka agar output pada tahun yang akan datang tumbuh 10 persen, atau bertambah sebesar Rp. 0,4 miliar, dibutuhkan investasi sebesar: 5 x Rp. 0,4 miliar = Rp. 2 miliar.

Dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan barang modal baru atau perubahan stok modal, melainkan Investasi (I) yang ditanam baik oleh swasta maupun pemerintah sehingga rumusan ICOR dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \dots\dots\dots (2.17)$$

keterangan:

I = Investasi

ΔY = perubahan output

Peningkatan output tidak hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi seperti: pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi, dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian, untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor selain investasi diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

2.2. Pengertian Investasi

Investasi sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Untuk menghasilkan output, selain membutuhkan bahan baku dan tenaga kerja juga diperlukan barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Dengan investasi diharapkan dapat menambah stok kapital dan pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas produksi. Dengan demikian, output dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Dalam jangka panjang akumulasi investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/negara.

Pemahaman kondisi tersebut memberikan pengertian pentingnya informasi investasi. Berdasarkan *System of National Accounts* (SNA), besarnya investasi yang direalisasikan di suatu wilayah/negara pada suatu tahun tertentu adalah sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditambah perubahan inventori/stok. SNA adalah buku panduan yang diterbitkan oleh *United Nations* (PBB) mengenai penyusunan neraca nasional. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang kapital, seperti: bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya; sedangkan inventori/stok meliputi output setengah jadi, atau input yang belum digunakan, termasuk juga barang jadi yang belum dijual. Inventori/stok termasuk dalam modal kerja yang merupakan bagian investasi yang

direncanakan. Perubahan inventori merupakan selisih antara stok akhir dengan stok awal pada suatu periode tertentu.

Investasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: fisik, finansial, dan sumber daya manusia (SDM). Investasi yang berwujud fisik dapat berupa: jalan, jembatan, gedung, kantor, mesin-mesin, mobil dan sebagainya. Investasi finansial dapat berupa: pembelian surat berharga, pembayaran premi asuransi, penyertaan modal dan investasi keuangan lainnya. Sedangkan investasi SDM dapat berupa pendidikan dan pelatihan. Dalam kajian ini, lebih ditekankan pada investasi fisik.

Konsep investasi yang digunakan dalam penghitungan ICOR mengacu pada konsep ekonomi nasional. Pengertian investasi adalah pembentukan barang modal tetap (*fixed capital formation*) yang terdiri dari: tanah, gedung/konstruksi, mesin dan perlengkapannya, kendaraan, dan barang modal lainnya. Sementara itu, nilai pembentukan modal mencakup:

- a. Pembelian barang baru dan barang bekas dari luar negeri,
- b. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan pihak lain,
- c. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan sendiri,
- d. Penjualan barang modal bekas.

Total nilai investasi diperoleh dari penjumlahan seluruh pembelian barang modal baru/bekas, pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan oleh pihak lain dan sendiri dikurangi penjualan barang modal bekas.

2.2.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah “bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Secara lebih rinci PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

PMTB dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. PMTB menurut jenis barang modal,
- b. PMTB menurut lapangan usaha/sektor,
- c. PMTB menurut institusi.

a. PMTB menurut jenis barang modal

PMTB menurut jenis barang modal dapat dibedakan atas:

- 1) Pembentukan modal berupa bangunan, yaitu: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, dan bangunan lainnya seperti: jalan raya, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan, pelabuhan, dan sebagainya.
- 2) Pembentukan modal berupa mesin, seperti: mesin pertanian, mesin pertambangan, mesin industri, dan alat perabot serta perlengkapan untuk kantor, hotel, dan restoran.

- 3) Pembentukan modal berupa alat angkutan seperti: mobil, bus, truk, kapal laut, pesawat, sepeda motor, dan sebagainya.
- 4) [Keterangan: yang dimaksud dalam PMTB adalah barang-barang modal yang digunakan untuk keperluan pabrik, kantor maupun usaha rumah tangga, tetapi tidak termasuk yang digunakan untuk konsumsi (*durable goods*)].
- 5) Barang modal lainnya seperti: perluasan hutan; pengembangan/perluasan lahan; penanaman kembali hutan; ternak untuk pembiakan, pemerahan susu atau sebagai alat angkutan; perluasan areal pertambangan; dan sebagainya.

b. PMTB menurut Lapangan Usaha

Klasifikasi PMTB menurut lapangan usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Pertanian, Kehutanan & Perikanan
- 2) Pertambangan dan penggalian
- 3) Industri pengolahan
- 4) Pengadaan Listrik & Gas
- 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang
- 6) Konstruksi
- 7) Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor
- 8) Transportasi & Pergudangan
- 9) Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
- 10) Informasi & Komunikasi
- 11) Jasa Keuangan & Asuransi
- 12) Real Estate
- 13) Jasa Perusahaan
- 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
- 15) Jasa Pendidikan
- 16) Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
- 17) Jasa lainnya

c. PMTB menurut Institusi

PMTB menurut institusi dibedakan atas tiga kelompok berikut:

- 1) Pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah disini adalah pemerintah yang menyelenggarakan *general administration*, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran PMTB oleh pemerintah misalnya untuk membangun gedung kantor, pembelian mesin-mesin, komputer untuk menyelenggarakan tugas pemerintah sebagai *administration*, termasuk juga bila pemerintah mengeluarkan biaya untuk kepentingan masyarakat yang bersifat infrastruktur, seperti: jalan raya, pembangunan irigasi, dan sebagainya.
- 2) Korporasi/Perusahaan Swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kategori ini hanya pengeluaran investasi yang benar-benar dikuasai BUMN/BUMD, tetapi tidak termasuk pengeluaran biaya oleh pemerintah pada butir a. di atas. Kegiatan yang dicakup perusahaan meliputi sektor finansial dan nonfinansial.
- 3) Rumah tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba. Kegiatan membangun rumah baru atau memperbaiki rumah milik sendiri secara besar-besaran dianggap sebagai bagian dari pembentukan modal. Hal ini sesuai dengan keharusan mengimputasi sewa rumah penduduk (rumah tangga) baik milik sendiri maupun rumah dinas.

2.2.2. Perubahan Inventori

Dalam PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- 1) Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- 2) Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- 3) Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- 4) Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- 5) Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- 6) Ternak untuk tujuan dipotong;
- 7) Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- 8) Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.3. Pengertian Output

Output diartikan sebagai seluruh nilai produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh berbagai sektor produksi. Dengan kata lain, output merupakan “keluaran” atau hasil yang diperoleh dari pendayagunaan seluruh faktor produksi baik berbentuk barang atau jasa seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan. Dari segi ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh

barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi domestik dalam suatu periode tertentu.

Dari segi perusahaan, output mencakup nilai barang (komoditi) jadi yang dihasilkan selama suatu periode tertentu ditambah nilai perubahan inventori/stok barang (komoditi) yang masih dalam proses. Output yang dimaksud adalah:

- a. Barang-barang yang dihasilkan.
- b. Tenaga listrik yang dijual.
- c. Selisih nilai stok setengah jadi.

Output ini dihitung atas dasar harga produsen, yaitu harga yang diterima oleh produsen pada tingkat transaksi pertama. Karena masih mengandung nilai penyusutan barang modal, output ini masih bersifat bruto. Untuk mendapatkan output neto atas harga pasar, output bruto atas harga pasar harus dikurangi dengan penyusutan barang modal.

Dalam pengertian ICOR, output adalah tambahan produk dari hasil kegiatan ekonomi dalam suatu periode atau nilai-nilai yang merupakan hasil pendayagunaan faktor-faktor produksi. Output ini merupakan seluruh nilai tambah atas dasar biaya faktor produksi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha. Seluruh output yang dihasilkan dinilai atas dasar harga produsen. Output juga merupakan nilai perolehan produsen atas kegiatan ekonomi produksinya.

2.4. Pengertian Nilai Tambah

Konsep Nilai Tambah berkaitan erat dengan konsep penghitungan output. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah nilai seluruh balas jasa faktor produksi yang meliputi upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung (neto). Dengan kata lain, nilai tambah adalah suatu tambahan nilai pada nilai input antara yang digunakan dalam proses menghasilkan barang/jasa. Nilai input antara tersebut bertambah karena input antara tersebut telah mengalami proses produksi yang mengubahnya menjadi barang yang nilainya lebih tinggi. Sedangkan input antara mencakup nilai seluruh komoditi yang habis atau dianggap habis dalam suatu proses produksi, seperti: bahan baku, bahan bakar, pemakaian listrik, dan sebagainya. Barang yang digunakan sebagai alat dalam suatu proses produksi dan umurnya

kurang dari setahun dan habis dipakai dimasukkan sebagai input antara (bukan barang modal).

Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari suatu unit produksi adalah output bruto atas dasar harga produsen dikurangi input antara atas dasar harga pasar. Karena keterbatasan data penyusutan barang modal dan pajak tak langsung, maka pendekatan nilai tambah bruto inilah yang dipakai untuk penghitungan ICOR ini.

2.5. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang ICOR telah dilakukan beberapa kali. Badan Pusat Statistik telah melakukan penghitungan ICOR Sektor Industri Pengolahan pada tahun 1983, 1993, dan 1994 dengan menggunakan hasil survei tahunan Industri Besar dan Sedang. Hasil penghitungan tahun 1983 dan 1993 tidak dipublikasikan, sementara hasil penghitungan tahun 1994 telah dipublikasikan. Penghitungan ICOR tahun 1983 menggunakan series data tahun 1975-1981; kemudian pada tahun 1993 menggunakan series data tahun 1985-1990; dan pada penghitungan tahun 1994 menggunakan series data tahun 1980-1990. Ketiga penghitungan ICOR tersebut dilakukan untuk klasifikasi jenis barang 2 dan 3 digit ISIC.

Sebelum tahun 1985, Survei Tahunan Industri Besar dan Sedang mengalami lewat cacah sehingga terjadi “*under coverage*” untuk jumlah perusahaan. Dalam mengatasi hal tersebut, BPS telah melakukan *backcasting* terhadap jumlah perusahaan agar cakupannya lebih lengkap. Pada penghitungan ICOR kedua (periode 1985-1990) telah digunakan nilai output sektor industri yang di-*backcast* sesuai dengan jumlah perusahaannya. Namun nilai investasi yang digunakan belum disesuaikan dengan cakupan yang lebih lengkap, sehingga nilai ICOR yang diperoleh relatif sangat rendah yang berkisar antara 1 sampai 2. Sebaliknya, pada penghitungan ICOR ketiga (periode 1980-1990) telah dilakukan *backcasting* terhadap nilai output dan investasi sehingga cakupan datanya sama, hal ini berpengaruh pada besaran ICOR yang dihasilkan relatif lebih baik.

Agar diperoleh satu nilai ICOR yang dapat mewakili suatu periode waktu untuk masing-masing klasifikasi industri digunakan penghitungan dengan rata-rata sederhana. Rumus yang digunakan pada penghitungan ICOR pertama dan kedua

sebanyak 12 rumus standar. Sedangkan pada penghitungan ICOR sektor industri yang ketiga digunakan sebanyak 15 rumus standar yang juga digunakan pada penghitungan ICOR dalam publikasi ini. Sebagai pembanding, pada penghitungan ICOR ketiga dilakukan pula penghitungan berdasarkan akumulasi investasi dengan *lag* 0 yang pada dasarnya menerapkan prinsip rata-rata tertimbang. Selain itu pada penghitungan ICOR ketiga ini juga dilakukan penghitungan ICOR yang memperhitungkan selisih stok bahan baku, barang jadi, dan barang setengah jadi.

Pada penghitungan ICOR yang pertama dan kedua digunakan nilai output dan nilai investasi sektor industri pengolahan sebagai data dasar. Namun pada penghitungan ICOR ketiga digunakan nilai tambah sebagai proksi dari variabel output, dan *fixed capital formation* (pembentukan modal tetap bruto) sebagai proksi dari variabel investasi. Penggunaan variabel nilai tambah sebagai proksi dari output dilakukan untuk menghindari *double counting*, karena output suatu kegiatan bisa merupakan input dari kegiatan lainnya. Nilai tambah yang digunakan dalam penghitungan ini adalah seluruh nilai output yang telah dikurangi dengan seluruh input/biaya antara. Selanjutnya, komponen nilai tambah yang bukan merupakan hasil pendayagunaan barang modal dikeluarkan dari seluruh nilai tambah.

Data sektor industri pengolahan skala besar dan sedang yang digunakan dalam penghitungan ICOR ini merupakan data menurut harga berlaku sehingga masih terpengaruh oleh inflasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data/nilai menurut harga konstan digunakan suatu indeks sebagai deflator.

Pada penghitungan ICOR pertama digunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) sebagai deflator untuk nilai output pada masing-masing kode industri. Sementara deflator untuk nilai investasi pada penghitungan ICOR pertama adalah IHPB barang-barang modal yang dihitung berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Survei Khusus Barang Modal.

Pada penghitungan ICOR kedua dan ketiga, deflator yang digunakan untuk nilai output masih sama dengan penghitungan ICOR pertama, yaitu dengan menggunakan IHPB untuk masing-masing kode ISIC industri. Sedangkan deflator untuk investasi adalah rata-rata tertimbang IHPB dari kode ISIC 382 (industri mesin bukan mesin listrik), 383 (industri mesin listrik dan perlengkapannya), 384 (industri alat angkutan), dan 390 (industri lainnya) dengan penimbang output dari masing-masing kode di atas.

Penghitungan ICOR di Provinsi DIY dilakukan 8 (delapan) kali oleh BPS, yaitu pada tahun 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 bekerja sama dengan Bappeda Provinsi DIY. Pada tahun 2003 penghitungan ICOR mencakup rentang waktu 1998-2002, pada tahun 2009 mencakup rentang waktu 2004-2008, dan seterusnya hingga tahun 2015 mencakup rentang waktu 2010-2015. Metode yang digunakan adalah metode standar dan metode akumulasi. Variabel investasi direpresentasikan dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Perhitungan ICOR dilakukan dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB dan memasukkan perubahan inventori, serta tanpa memperhitungkan perubahan inventori.

Penyusunan ICOR sektoral yang telah dilakukan tersebut mengacu pada klasifikasi PDRB yang terdiri dari 9 sektor ekonomi. Penyusunan ICOR DIY tahun 2003 menggunakan data PDRB dengan tahun dasar 1993 dan sisanya menggunakan data PDRB tahun dasar 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sektor ekonomi DIY yang mempunyai nilai ICOR relatif rendah adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sedangkan sektor yang memiliki nilai ICOR tinggi adalah sektor listrik, gas, dan air bersih dan sektor pengangkutan dan komunikasi.



BAB III

METODOLOGI

3.1. Sumber Data

3.2. Estimasi PMTB menurut Lapangan Usaha

3.3. Penghitungan Pertambahan Output menurut Lapangan Usaha

3.4. Metodologi Penghitungan ICOR

3.4.1. Metode Standar

3.4.2. Metode Akumulasi Investasi

3.4.3. Time Lag Investasi

3.4.4. Koefisien ICOR Negatif



BAB III

METODOLOGI

3.1. Sumber Data

Dalam penyusunan ICOR sektoral DIY 2011-2015, data yang digunakan bersumber dari hasil sensus dan survei-survei yang dilakukan oleh BPS. Data tersebut antara lain: Sensus Ekonomi 2006, Survei Tahunan Industri Besar/Sedang, Survei Tahunan Perusahaan Air Minum, Survei Tahunan Konstruksi, Survei Khusus Pendapatan Regional, Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga, Survei Angkatan Kerja Nasional, serta survei lainnya yang relevan. Selain itu, digunakan juga data dari penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik menurut lapangan usaha (*by industry*) maupun menurut pengeluaran (*by expenditure*). Data PDRB yang digunakan dalam penyusunan ICOR DIY 2011-2015 menggunakan tahun dasar 2010. Pemanfaatan hasil sensus dan survei ini dilakukan karena penghitungan ICOR memerlukan sumber dan cakupan data yang cukup luas. Sebagai referensi, digunakan juga sumber data sekunder yang diperoleh dari Bappeda Bidang Investasi/Badan Kerja sama dan Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) berupa data investasi PMA/PMDN yang disetujui maupun realisasi, dan Bank Indonesia Yogyakarta berupa data kredit investasi.

3.2. Estimasi PMTB menurut Lapangan Usaha

PMTB dihitung atas dasar harga konstan 2010, karena pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Penghitungan PMTB menurut lapangan usaha menggunakan metode alokasi. Sebagai alokator adalah nilai penyusutan masing-masing sektor yang diperoleh pada penghitungan PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan total investasi dihitung dari jumlah PDRB yang digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stok.

Nilai penyusutan digunakan sebagai alokator berdasarkan pada pemikiran bahwa penyusutan barang modal tetap yang terjadi pada tahun tertentu akan dipakai untuk investasi pada tahun itu juga. Ini berarti bahwa investasi mempunyai hubungan

linier dengan nilai penyusutan, sehingga lapangan usaha yang mempunyai nilai penyusutan besar akan memiliki investasi yang besar pula.

3.3. Penghitungan Pertambahan Output menurut Lapangan Usaha

Penghitungan pertambahan output (ΔY) didekati dengan pertambahan nilai tambah bruto (ΔNTB) menurut lapangan usaha. Sebagai contoh, peningkatan output pertanian tahun 2015 didekati dengan pengurangan nilai tambah pertanian pada tahun 2015 atas dasar harga konstan dengan nilai tambah pertanian pada tahun 2014 atas dasar harga konstan. Dengan perlakuan yang sama, pertambahan output menurut lapangan usaha dihitung sebagai pertambahan NTB menurut lapangan usaha.

Pendekatan di atas dilakukan karena data NTB tersedia dengan *time series* yang cukup panjang diturunkan dari penghitungan PDRB menurut lapangan usaha. Selain itu, untuk beberapa lapangan usaha yang outputnya berupa jasa, maka penghitungan nilai tambah akan lebih mudah dan lebih tepat.

3.4. Metode Penghitungan ICOR

Ada dua metode penghitungan ICOR yang digunakan, yaitu metode standar dan metode akumulasi investasi. Untuk tujuan keterbandingan, investasi didekati dengan dua cara, yaitu identik dengan PMTB dengan dan tanpa memperhitungkan Perubahan Inventori. Penghitungan ICOR periode 2011-2015 dibatasi hanya dengan menggunakan metode standar lag 0, lag 1, dan lag 2, sedangkan untuk metode akumulasi hanya lag 0 saja.

3.4.1. Metode Standar

Secara matematis rumus yang digunakan untuk menghitung ICOR adalah:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \dots\dots\dots (3.1)$$

keterangan :

ΔK = pertambahan kapital/barang modal baru/kapasitas terpasang

ΔY = pertambahan output

Dalam praktek, data yang diperoleh bukan penambahan barang modal baru atau penambahan kapasitas terpasang, melainkan besarnya realisasi nilai investasi yang ditanam baik oleh Pemerintah maupun Swasta. Sehingga dengan mengasumsikan $\Delta K = I$ (investasi), maka rumus (3.1) dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \dots\dots\dots (3.2)$$

Rumus (3.2) ini disebut dengan **Gross ICOR**, yaitu suatu rasio yang menunjukkan besarnya tambahan unit kapital yang diperlukan untuk memperoleh tambahan satu unit output pada suatu periode tertentu. Dalam penerapannya rumus *Gross ICOR* ini lebih sering dipakai karena data yang digunakan tersedia relatif lebih lengkap.

Dalam beberapa hal untuk kasus-kasus tertentu, investasi yang ditanamkan pada suatu tahun akan langsung menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga, sehingga rumus (3.2) di atas dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \dots\dots\dots (3.3)$$

keterangan :

I = investasi pada tahun ke-t

Y_t = output pada tahun ke-t

Y_{t-1} = output pada tahun t-1

Rumus (3.3) di atas dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun ke-t akan menimbulkan output pada tahun t itu juga.

Pada metode standar, langkah penghitungan dilakukan terlebih dahulu dengan mencari ICOR pada masing-masing tahun untuk periode waktu t_1 sampai t_n , sehingga akan didapatkan nilai ICOR sebanyak n buah. ICOR yang dianggap dapat mewakili untuk periode waktu tersebut (t_1 s.d t_n) diperoleh dengan jalan membagi antara jumlah nilai ICOR selama periode waktu t_1 s.d t_n dengan jumlah tahun (n), atau dengan mencari rata-rata nilai ICOR selama periode t_1 sampai dengan t_n .

Prinsip dari penghitungan ICOR metode standar ini adalah rata-rata sederhana dan penulisannya secara matematis sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{1}{n} \sum \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \dots\dots\dots (3.4)$$

Kelemahan dari penggunaan rata-rata sederhana ini adalah jika terjadi suatu koefisien ICOR yang ekstrim pada tahun-tahun tertentu, maka koefisien ini berpengaruh pada nilai rata-rata koefisien ICOR dalam periode waktu penghitungan. Namun demikian, penggunaan metode standar ini mempunyai daya tarik lain yaitu mampu mencerminkan *inefficiency* yang sering terjadi dalam praktek.

3.4.2. Metode Akumulasi Investasi

Pendekatan penghitungan ICOR dengan metode akumulasi berdasarkan suatu anggapan bahwa timbulnya kenaikan output selama periode waktu t disebabkan karena adanya akumulasi investasi selama periode waktu t .

Perumusan ICOR dengan metode ini adalah rasio antara akumulasi investasi terhadap akumulasi peningkatan output selama periode waktu t_1 sampai t_n yang secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\sum I_t}{\sum (Y_t - Y_{t-1})} \dots\dots\dots (3.5)$$

Kelebihan dari metode akumulasi adalah, dalam penerapannya metode ini terkandung prinsip rata-rata tertimbang. Dengan digunakannya rata-rata tertimbang, maka koefisien ICOR ekstrim yang terjadi pada tahun-tahun tertentu bisa dihindari. Tetapi, metode akumulasi ini tidak memperhitungkan kapasitas terpasang yang berlebih dan tidak dimanfaatkan secara penuh. Dengan kata lain, metode akumulasi relatif kurang mampu mencerminkan *inefficiency*, yang memang terjadi dalam praktek.

3.4.3. Time lag Investasi

Biasanya investasi yang ditanam pada tahun tertentu tidak secara langsung memberikan hasil tambahan output pada tahun itu juga, tetapi memerlukan waktu beberapa tahun lagi. Rentang waktu yang diperlukan agar penanaman investasi dapat menghasilkan tambahan output disebut *time lag (lag)*.

Jika investasi yang ditanam pada tahun ke-t baru menimbulkan kenaikan output setelah s tahun, maka rumus (4) di atas (ICOR metode standar) dengan adanya faktor *time lag* dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{1}{n} \sum \frac{I_t}{(Y_{t+s} - Y_{t+s-1})} \dots\dots\dots (3.6)$$

keterangan :

Time lag = 0, 1, 2, 3, 4, dst.

S = lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil/output terhitung sejak penanaman investasi.

3.4.4. Koefisien ICOR Negatif

Koefisien ICOR negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Penurunan output terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, tetapi barang modal baru tersebut sementara belum memproduksi atau telah memproduksi tetapi output yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output tahun sebelumnya. Sehingga selisih output antara tahun ditanamkannya investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien ICOR-pun menjadi negatif. Dengan demikian, penanaman barang modal baru belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu. Tetapi jika ada penambahan/penggantian barang modal, maka tidak bisa dikatakan bahwa telah terjadi *inefficiency*. Namun demikian secara makro keadaan yang disebutkan terakhir ini jarang terjadi.

3.4.5. Koefisien ICOR yang Besar dan Positif

Koefisien ICOR yang relatif besar terjadi jika nilai investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan relatif kecil. Koefisien ICOR yang besar juga bisa terjadi pada lapangan usaha yang bersifat *capital intensive*.

3.4.6. Asumsi Dasar

Walaupun pertambahan output sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi, dalam penghitungan ICOR ini digunakan asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi output selain investasi, dengan kata lain faktor-faktor lain di luar investasi dianggap konstan (*ceteris paribus*). Jadi perubahan/kenaikan output hanya disebabkan oleh adanya perubahan kapital/investasi.

Output dari suatu kegiatan ekonomi merupakan input antara untuk kegiatan ekonomi lainnya, sehingga jika digunakan konsep output dalam penghitungan ICOR dirasakan kurang tepat karena akan terjadi penghitungan ganda (*double counting*), yaitu output dari suatu perusahaan akan dihitung kembali sebagai input perusahaan lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam penghitungan ICOR digunakan **konsep Nilai Tambah**.

Konsep Nilai Tambah (*Value Added*) yang digunakan dalam penghitungan ICOR ini selanjutnya dinamakan dengan istilah **ICVAR (*Incremental Capital Value Added Ratio*)**. Meskipun demikian, ukuran ICVAR ini juga digunakan untuk memprediksi suatu rasio investasi terhadap output menurut lapangan usaha, dan bukannya terhadap nilai tambah semata.

ICOR yang disajikan telah memperhitungkan perubahan inventori (selisih stok) baik bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Dalam pendekatan mikro, umumnya perusahaan diasumsikan tidak melakukan penimbunan atau akumulasi stok barang untuk kelancaran produksi. Dalam pendekatan makro, perusahaan dianggap telah membuat keputusan akumulasi stok dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang akan datang. Misalnya, dalam hal ada kecenderungan bahan baku akan melonjak, perusahaan dapat mengambil keputusan melakukan akumulasi stok bahan baku dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mendatang. Penghitungan ICOR di sini, menggunakan pendekatan makro, dengan menganggap perubahan inventori/stok sebagai bagian dari pembentukan modal (investasi).

Beberapa asumsi lainnya yang dipakai dalam penyusunan ICOR ini adalah:

1. Perubahan output semata-mata hanya disebabkan oleh perubahan kapital/adanya investasi.

2. Faktor-faktor lain di luar investasi, seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan wiraswasta diasumsikan konstan.

Dengan asumsi-asumsi di atas angka ICOR mempunyai keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak mampu menjelaskan penyebab pertumbuhan ekonomi, apakah dipengaruhi oleh pertumbuhan faktor produksi atau tingkat produktivitasnya.
2. Tidak mampu menjelaskan besaran peranan faktor di luar perubahan kapital dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi.
3. Proses penghitungan ICOR yang optimal sebaiknya menggunakan periode referensi yang panjang misalnya 10 tahun ke atas, karena pembentukan modal bersifat akumulatif. Dalam kajian ini hanya dibatasi selama periode 2011-2015.

3.5. Indeks Perkembangan

Indeks Perkembangan menunjukkan tingkat perkembangan agregat PDRB dari tahun ke tahun dibandingkan dengan tahun dasarnya. Indeks ini diperoleh dengan membagi nilai PDRB menurut lapangan usaha pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks perkembangan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IP = \frac{PDRB_{it}}{PDRB_{i0}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.7)$$

keterangan :

- IP = Indeks Perkembangan
 i = lapangan usaha 1, ..., n
 t = tahun t
 0 = tahun dasar



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pertumbuhan Ekonomi

4.2. Perkembangan Nilai Investasi

4.3. Struktur Investasi

4.4. Angka ICOR Provinsi DIY

4.4.1. ICOR Total

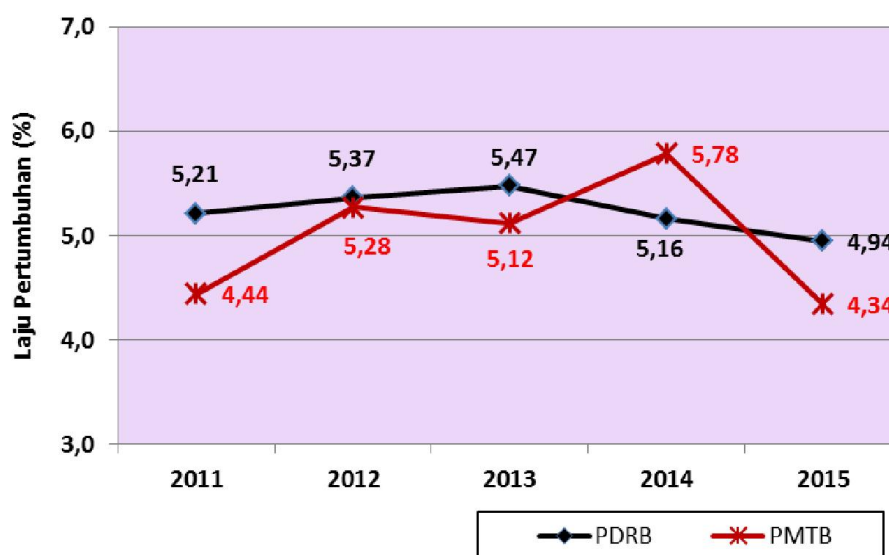
4.4.2. ICOR menurut Lapangan Usaha

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian wilayah secara riil. Pertumbuhan ekonomi bisa dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (1 tahun). Secara umum laju pertumbuhan ekonomi DIY selama periode 2011-2015 cenderung melambat, walaupun pada periode 2011-2013 sempat mengalami akselerasi dari 5,21 persen (2011) menjadi 5,47 persen (2013). Namun pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi DIY mengalami perlambatan menjadi 5,16 persen. Situasi politik yang cukup memanas sehubungan dengan adanya pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden serta kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2014 dan penurunan produksi pertanian turut andil pada perlambatan pertumbuhan ekonomi DIY. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi DIY kembali melambat menjadi 4,94 persen.

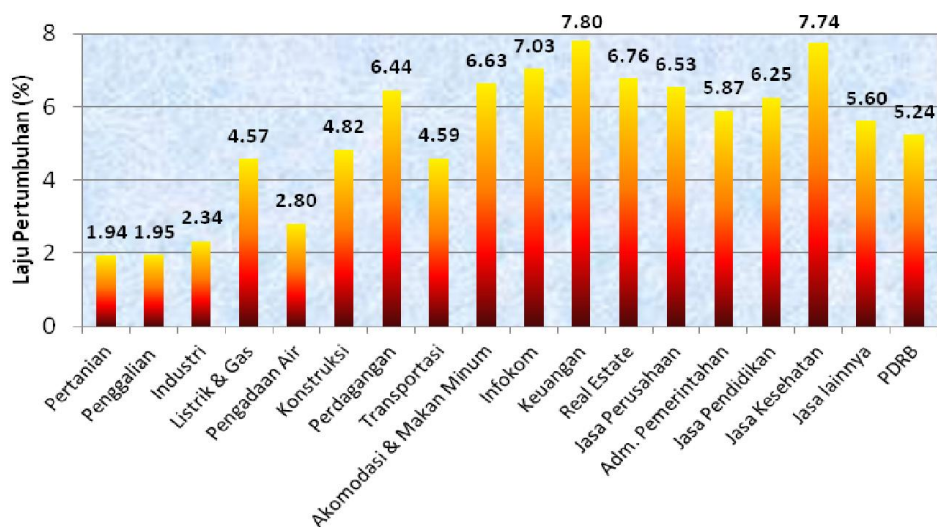


Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PMTB Provinsi DIY, 2011-2015 (%)

Di sisi lain, pertumbuhan investasi fisik sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, yang dicerminkan oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami fluktuasi selama periode 2011–2015. Tercatat pertumbuhan investasi terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,34 persen dan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 5,78 persen. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 PMTB tumbuh di atas 5 (enam) persen. Sedangkan pada tahun 2011 dan 2015 pertumbuhan PMTB di bawah 5 persen (Gambar 4.1).

Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,24 persen. Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Tiga lapangan usaha dengan rata-rata laju pertumbuhan tertinggi adalah jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh sebesar 7,80 persen; disusul oleh jasa kesehatan sebesar 7,74 persen; serta informasi dan komunikasi sebesar 7,03 persen. Ketiga kategori tersebut termasuk dalam kelompok lapangan usaha tersier. Sedangkan tiga lapangan usaha dengan rata-rata laju pertumbuhan terendah adalah pertanian; pertambangan dan penggalian; serta industri pengolahan yang tumbuh masing-masing sebesar 1,94 persen, 1,95 persen, dan 2,34 persen. Dua kategori pertama termasuk dalam kelompok lapangan usaha primer.



Gambar 4.2. Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (%)

Pada tahun 2015, dari 17 lapangan usaha, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif kecuali lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang mengalami kontraksi sebesar 1,32 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada

lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh sebesar 8,35 persen. Sepuluh lapangan usaha mengalami pertumbuhan di atas 5 persen. Sembilan lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan di atas 5 persen berturut-turut adalah sebagai berikut: jasa lainnya (8,00%), jasa perusahaan (7,31%), jasa pendidikan (7,28%), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (7,15%), real estate (6,45%), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (6,19%), penyediaan akomodasi dan makan minum (5,77%), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (5,18%), serta informasi dan komunikasi (5,11%). Selama 5 tahun terakhir, sepuluh lapangan usaha tersebut juga mempunyai rata-rata pertumbuhan tahunan di atas 5 persen.

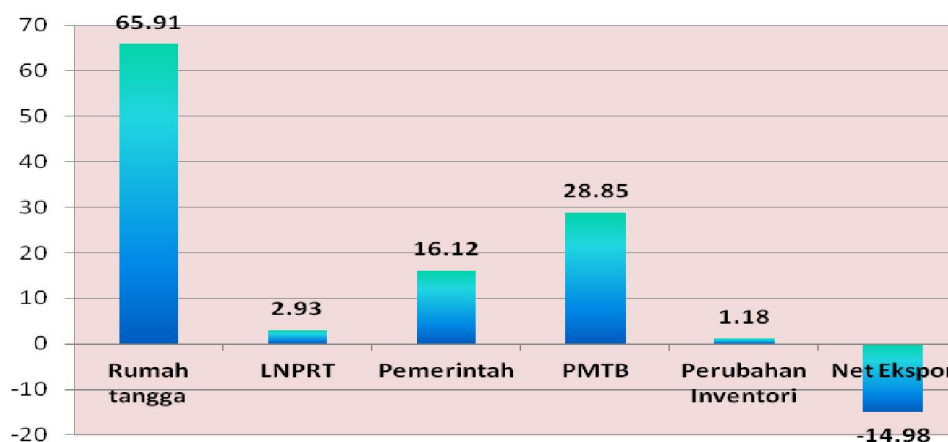
Tabel 4.1. Pertumbuhan Ekonomi DIY menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (%)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**	Rata-rata 2011-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	-1.63	5.13	2.26	-2.10	2.60	1.94
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	-1.89	5.55	2.33	-2.99	2.50	1.80
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	0.27	0.47	0.54	3.53	2.83	1.83
c. Perikanan	0.29	6.81	4.87	6.50	4.21	5.59
2. Pertambangan & Penggalian	7.28	1.67	3.92	2.11	0.13	1.95
3. Industri Pengolahan	5.39	-2.84	6.87	3.82	1.75	2.34
4. Pengadaan Listrik & Gas	5.63	10.20	6.08	3.67	-1.32	4.57
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0.31	3.46	0.95	3.91	2.90	2.80
6. Konstruksi	4.85	4.46	4.94	5.65	4.24	4.82
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	5.12	8.66	5.26	5.69	6.19	6.44
8. Transportasi & Pergudangan	3.94	4.73	6.10	3.80	3.73	4.59
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5.69	6.82	7.13	6.79	5.77	6.63
a. Penyediaan Akomodasi	9.32	11.81	8.51	4.93	7.17	8.08
b. Penyediaan Makan Minum	4.95	5.76	6.82	7.21	5.46	6.31
10. Informasi & Komunikasi	9.55	10.74	6.22	6.13	5.11	7.03
11. Jasa Keuangan & Asuransi	11.33	3.23	11.50	8.27	8.35	7.80
a. Jasa Perantara Keuangan	11.52	2.72	14.89	9.92	9.08	9.06
b. Lainnya	10.89	4.49	3.38	3.90	6.30	4.51
12. Real Estate	4.47	8.88	4.01	7.77	6.45	6.76
13. Jasa Perusahaan	6.57	7.99	3.27	7.61	7.31	6.53
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	4.64	7.49	4.94	5.90	5.18	5.87
15. Jasa Pendidikan	7.62	5.26	4.58	7.91	7.28	6.25
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	6.52	9.18	7.00	7.65	7.15	7.74
17. Jasa lainnya	6.83	4.28	4.86	5.29	8.00	5.60
PDRB	5.21	5.37	5.47	5.16	4.94	5.24

Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Jika ditinjau dari sisi Pengeluaran, porsi terbesar PDRB digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam periode 2011-2015, rata-rata porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga per tahun di DIY sebesar 65,91 persen dari total PDRB. Komponen terbesar kedua adalah PMTB dengan *share* rata-rata mencapai 28,85 persen. Komponen terbesar ke tiga adalah konsumsi pemerintah dengan *share* rata-rata sebesar 16,12 persen. Sementara untuk pengeluaran konsumsi lembaga non-profit dan perubahan inventori kontribusinya di bawah 5 persen. Secara umum, selama lima tahun terakhir kebutuhan domestik belum bisa dipenuhi oleh produksi domestik di wilayah DIY sehingga komponen ekspor netto bernilai negatif sebesar -14,98 persen (Gambar 4.3). Artinya, Provinsi DIY mengalami defisit neraca perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa di wilayah DIY tidak bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat di DIY. Artinya potensi pasar di DIY relatif besar dan merupakan peluang bagi produsen untuk memproduksi barang dan jasa yang tadinya diimpor dari daerah lain. Strategi ini dikenal dengan kebijakan substitusi impor. Namun demikian, dalam pengembangan produk substitusi impor harus diperhitungkan penguasaan teknologi dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.3. Rata-rata Distribusi Persentase PDRB DIY menurut Pengeluaran, 2011-2015 (%)

Dalam kurun waktu 2011-2015, komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPR). Komponen ini tumbuh rata-rata 8,16

persen per tahun. Proses recovery korban bencana alam pasca erupsi Gunung Merapi pada akhir tahun 2010 dan momen pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden pada tahun 2014 menyebabkan komponen ini tumbuh cukup tinggi dalam kurun waktu 2011-2014. Namun demikian, andil pertumbuhan komponen ini relatif kecil karena kontribusinya terhadap perekonomian DIY kurang dari 2 persen. Komponen lainnya yang tumbuh di atas 5 persen per tahun adalah impor (6,56%), ekspor (6,50%), konsumsi pemerintah (5,37%), konsumsi rumah tangga (5,31%), dan PMTB (5,13%). Sementara Perubahan inventori mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,63 persen per tahun.

Jika diamati selama lima tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung melambat dari 6,45 persen pada tahun 2011 menjadi 4,87 persen di tahun 2015. Di sisi lain, komponen investasi fisik (PMTB) agak berfluktuasi meningkat dari 4,44 persen pada tahun 2011 dan cenderung meningkat hingga menjadi 5,78 persen di tahun 2014 kemudian melambat menjadi 4,34 pada tahun 2015. Pertumbuhan PMTB merupakan indikator peningkatan investasi di DIY. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi diperlukan ada upaya yang cukup keras untuk meningkatkan laju pertumbuhan PMTB pada level 6-7 persen. Di sisi lain volume perdagangan antar wilayah menunjukkan peningkatan yang cukup besar baik ekspor maupun impor. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian DIY semakin terbuka dengan wilayah luar DIY (Tabel 4.2).

Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi DIY menurut Pengeluaran, 2011-2015 (%)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**	Rata-rata 2011-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6.45	6.44	4.85	5.08	4.87	5.31
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	13.89	8.90	10.42	10.58	2.90	8.16
3. Konsumsi Pemerintah	4.60	5.91	5.90	4.35	5.32	5.37
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.44	5.28	5.12	5.78	4.34	5.13
5. Perubahan Inventori	-18.37	-1.02	3.44	11.78	4.73	4.63
6. Ekspor Barang dan Jasa	5.82	8.90	5.64	6.82	4.70	6.50
7. Impor Barang dan Jasa	6.27	9.85	5.08	7.02	4.37	6.56
PDRB	5.21	5.37	5.47	5.16	4.94	5.24

Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jabalnusra, selama lima tahun terakhir Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi

sebesar 5,24 persen per tahun dan merupakan terendah kedua setelah Provinsi NTT yang tumbuh rata-rata 5,23 persen per tahun. Semua provinsi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tumbuh di atas 5 (lima) persen dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Provinsi NTB sebesar 7,17 persen, diikuti Provinsi Bali sebesar 6,60 persen, dan Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata pertumbuhan 6,10 persen. Provinsi Banten dan Jawa Timur selama lima tahun terakhir mempunyai rata-rata pertumbuhan di atas 6 persen, sedangkan Jawa Barat dan Jawa Tengah rata-rata tumbuh di bawah 6 persen.

Tabel 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jabalnusra, 2011-2015 (%)

Provinsi	2011	2012	2013*	2014*	2015**	Rata-rata 2011-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI	6,73	6,53	6,07	5,91	5,88	6,10
JABAR	6,50	6,50	6,33	5,09	5,03	5,74
JATENG	5,30	5,34	5,11	5,28	5,44	5,29
DIY	5,21	5,37	5,47	5,16	4,94	5,24
JATIM	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	6,01
BANTEN	7,03	6,83	6,67	5,47	5,37	6,08
BALI	6,66	6,96	6,69	6,73	6,04	6,60
NTB	-3,91	-1,54	5,16	5,06	21,24	7,17
NTT	5,67	5,46	5,41	5,05	5,02	5,23
Indonesia	6,17	6,03	5,56	5,02	4,79	5,35

Sumber: BPS (diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

4.2. Perkembangan Nilai Investasi

Besarnya modal yang akan diinvestasikan untuk proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya. Produktivitas marginal adalah tambahan output yang diperoleh pada setiap tambahan satu unit modal dalam proses produksi dengan faktor produksi yang lain konstan (*ceteris paribus*). Investasi akan terus dilakukan apabila produktivitas investasi masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga yang akan diterimanya seandainya modal itu dipinjamkan dan tidak diinvestasikan.

Dalam penyusunan ICOR Daerah Istimewa Yogyakarta, konsep investasi mencakup pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perubahan inventori (Δ inventori). Berdasarkan harga konstan 2010, perkembangan nilai investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2010–2015 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 nilai investasi atas dasar harga konstan mencapai Rp. 18,47 triliun, kemudian terus meningkat menjadi Rp. 23,26 triliun pada tahun 2015 (Tabel

4.4). Secara umum rata-rata pertumbuhan investasi di DIY selama periode 2010-2015 sebesar 4,73 persen per tahun.

Tabel 4.4. Perkembangan Nilai Investasi di DIY, 2010–2015 (Juta Rp.)

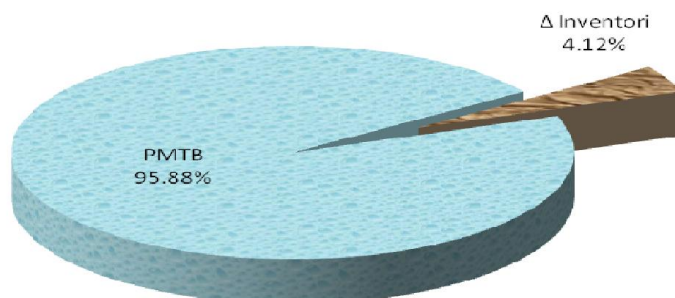
Tahun	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	PMTB	Δ Inventori	Jumlah	PMTB	Δ Inventori	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
2010	17,470,045	996,125	18,466,170	17,470,045	996,125	18,466,170
2011	19,325,555	935,146	20,260,700	18,245,345	813,139	19,058,485
2012	21,148,871	969,334	22,118,205	19,207,890	804,880	20,012,770
2013	24,250,704	967,150	25,217,854	20,190,810	832,540	21,023,350
2014*	27,744,794	980,197	28,724,991	21,358,622	930,599	22,289,222
2015**	30,935,037	1,180,158	32,115,195	22,286,615	974,645	23,261,260

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

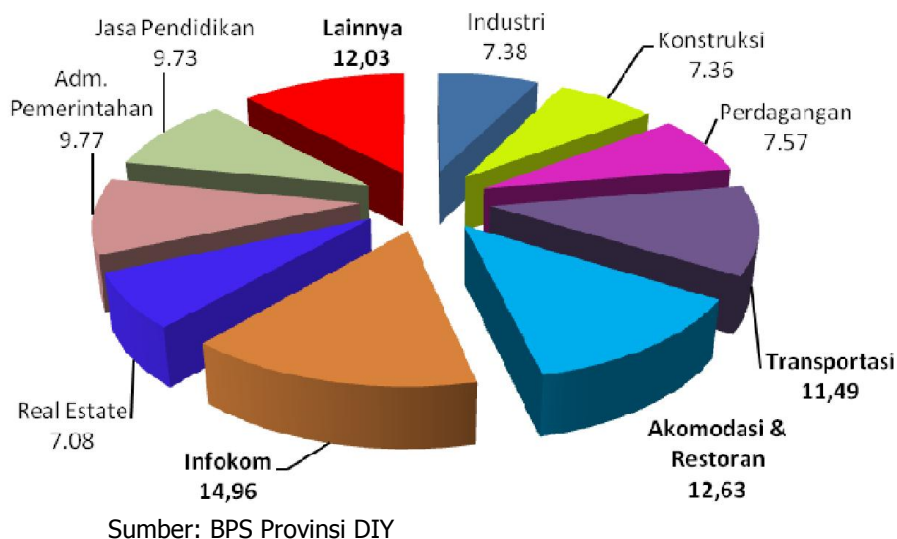
4.3. Struktur Investasi

Jika investasi dibagi menjadi dua komponen yaitu pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perubahan inventori, maka selama periode 2011-2015 rata-rata proporsi PMTB mencapai 95,88 persen dari total investasi, sedangkan perubahan inventori hanya sebesar 4,12 persen (Gambar 4.4). PMTB merupakan investasi fisik dalam bentuk tanah, bangunan, mesin, kendaraan, *cultivated biological resources*, dan peralatan lainnya. Sedangkan perubahan inventori merupakan selisih stok barang pada posisi akhir dikurangi dengan posisi stok pada awal tahun. Perubahan inventori mencakup stok dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi.



Sumber: BPS Provinsi DIY

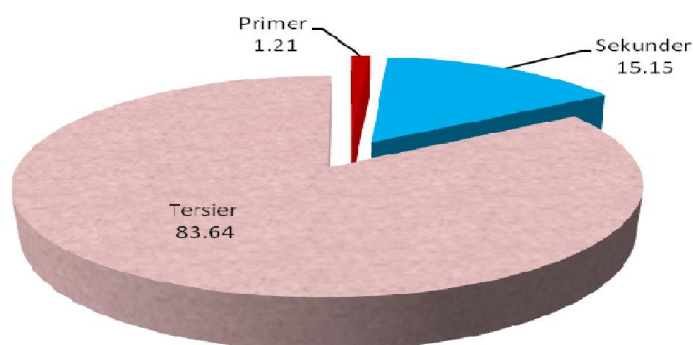
Gambar 4.4. Rata-rata Proporsi PMTB terhadap Total Investasi DIY, 2011-2015



Gambar 4.5. Struktur Investasi menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (%)

Sedangkan jika ditinjau menurut lapangan usaha, selama periode 2011-2015 rata-rata investasi terbesar dilakukan pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 14,96 persen. Lapangan usaha lainnya yang merupakan 3 penyumbang terbesar dalam pembentukan investasi di DIY adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 12,63 persen serta pengangkutan dan perdagangan sebesar 11,49 persen. Lapangan usaha lainnya dengan share di atas 5 persen berturut-turut adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (9,77%); jasa pendidikan (9,73%); perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (7,57%); industri pengolahan (7,38%); konstruksi (7,36%); serta real estate (7,08%). Sedangkan delapan lapangan usaha yang lain kontribusinya relatif kecil yaitu rata-rata di bawah 4 persen (Gambar 4.5).

Selanjutnya jika ditinjau menurut kelompok industri selama periode pengamatan, rata-rata porsi investasi terbesar terjadi pada kelompok industri tersier yaitu 83,64 persen, diikuti kelompok industri sekunder (15,15 persen), dan kelompok industri primer (1,21 persen). Kelompok industri primer meliputi pertanian dan penggalian; kelompok industri sekunder terdiri dari industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan sisanya merupakan kelompok industri tersier (Gambar 4.6).



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.6. Struktur Investasi di Provinsi DIY menurut Kelompok Industri, 2011-2015 (%)

Ditinjau secara spasial, rata-rata total investasi menurut kabupaten/kota atas dasar harga berlaku selama periode 2011-2015 tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sleman dengan nilai sebesar Rp 10,33 triliun. Investasi di Kabupaten Sleman tersebut menyumbang sekitar 40,46 persen terhadap total investasi di DIY. Kemudian diikuti oleh Kota Yogyakarta Rp 6,08 triliun, Kabupaten Bantul Rp 3,97 triliun, Kabupaten Gunungkidul Rp 3,17 triliun, dan terendah di Kabupaten Kulonprogo Rp 1,98 triliun dengan kontribusi masing-masing sebesar 23,82 persen, 15,53 persen, 12,42 persen, dan 7,77 persen.

Tabel 4.5. Nilai Investasi di DIY menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Berlaku, 2011-2015 (Juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2011	2012	2013	2014*	2015**	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	1.595.453 (7,88)	1.740.627 (7,87)	1.973.552 (7,84)	2.244.693 (7,85)	2.366.855 (7,50)	1.984.236 (7,77)
Bantul	3.169.386 (15,66)	3.451.784 (15,60)	3.918.392 (15,56)	4.435.608 (15,51)	4.861.366 (15,41)	3.967.307 (15,53)
Gunungkidul	2.535.638 (12,53)	2.751.888 (12,44)	3.116.754 (12,38)	3.553.886 (12,42)	3.897.753 (12,36)	3.171.184 (12,42)
Sleman	8.075.634 (39,89)	8.887.290 (40,18)	10.176.525 (40,41)	11.540.099 (40,34)	12.987.646 (41,18)	10.333.439 (40,46)
Yogyakarta	4.867.480 (24,04)	5.289.493 (23,91)	5.999.960 (23,82)	6.830.659 (23,88)	7.427.373 (23,55)	6.082.993 (23,82)
Jumlah	20.243.591 (100,00)	22.121.081 (100,00)	25.185.184 (100,00)	28.604.946 (100,00)	31.540.993 (100,00)	25.539.159 (100,00)

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Angka dalam kurung adalah share investasi kabupaten/kota terhadap total investasi

Tabel 4.6. Nilai Investasi di DIY menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Konstan 2010, 2011-2015 (Juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2011	2012	2013	2014*	2015**	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	1.481.228 (7,32)	1.547.101 (6,99)	1.615.213 (6,41)	1.694.703 (5,92)	1.754.308 (6,17)	1.618.511 (6,50)
Bantul	2.973.499 (14,69)	3.131.690 (14,16)	3.290.941 (13,07)	3.466.115 (12,12)	3.639.678 (12,80)	3.300.385 (13,25)
Gunungkidul	2.372.150 (11,72)	2.470.653 (11,17)	2.582.320 (10,25)	2.711.059 (9,48)	2.844.167 (10,01)	2.596.070 (10,42)
Sleman	7.631.626 (37,70)	8.079.849 (36,53)	8.532.740 (33,88)	9.063.136 (31,68)	9.463.795 (33,29)	8.554.229 (34,33)
Yogyakarta	4.591.151 (22,68)	4.824.221 (21,81)	5.066.226 (20,12)	5.363.140 (18,75)	5.491.038 (19,32)	5.067.155 (20,34)
Jumlah	19.049.654 (100,00)	20.053.513 (100,00)	21.087.441 (100,00)	22.298.152 (100,00)	23.192.987 (100,00)	21.136.349 (100,00)

Sumber: Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

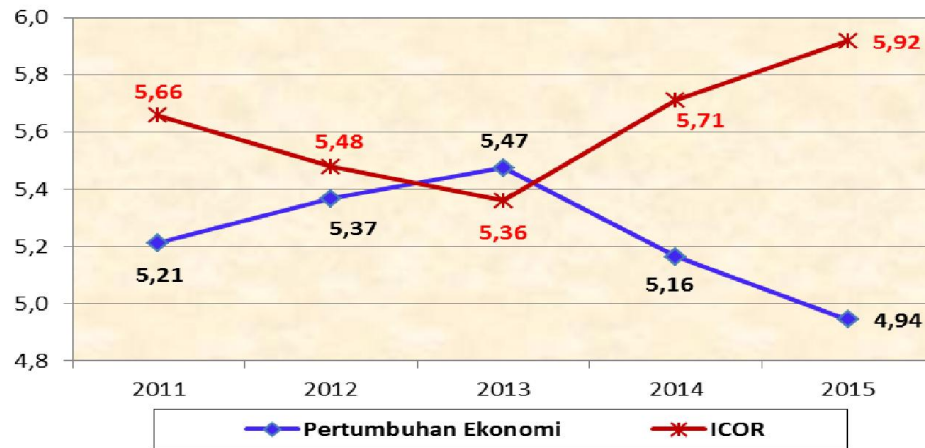
Angka dalam kurung adalah share investasi kabupaten/kota terhadap total investasi

4.4. Angka ICOR DIY

4.4.1. ICOR Total

Gambar 4.7 menyajikan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dan ICOR DIY selama periode 2011-2015. Pada tahun 2015 angka ICOR DIY meningkat dari 5,71 pada tahun 2014 menjadi 5,92 pada tahun 2015. Dari Gambar 4.7 terlihat bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 angka ICOR DIY per tahun relatif tinggi yaitu di atas 5 (lima) persen. Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan penanaman modal (investasi) yang dilakukan di DIY relatif kurang efisien. Dalam kurun waktu 2011 hingga 2013, ICOR DIY cenderung mengecil dari 5,66 (2011) menjadi 5,36 (2013). Pada tahun 2014 dan 2015 angka ICOR DIY cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada tahun 2014 relatif kurang efisien dibandingkan dengan tahun 2013 dan pada tahun 2015 semakin kurang efisien. Pada tahun 2015, untuk memperoleh tambahan output sebesar 1 (satu) unit diperlukan tambahan investasi sebesar 5,93 unit, sedangkan pada tahun 2014 dan 2013 hanya diperlukan tambahan investasi masing-masing sebesar 5,71 unit, dan 5,36 unit. Secara umum, angka ICOR DIY masih relatif tinggi yang menandakan

proses produksi relatif kurang efisien. Secara umum, angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran 3-4.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.7. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY, 2011-2015

Pada level kabupaten/kota, tampak bahwa pada tahun 2015 ICOR tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman 6,67, diikuti Kabupaten Kulonprogo sebesar 6,29, Kabupaten Gunungkidul 5,55, Kabupaten Bantul sebesar 4,90, dan terendah Kota Yogyakarta 3,87. Tingginya ICOR di Kabupaten Sleman antara lain disebabkan oleh jenis investasi yang ditanamkan biasanya padat modal. Lapangan usaha yang dominan di Kabupaten Sleman adalah industri pengolahan, konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Di wilayah Sleman, meskipun masih didominasi oleh industri makanan dan minuman, namun peranan industri tekstil dan pakaian jadi cukup besar, sehingga industri lebih bersifat kapital intensive. Selain itu, peranan lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang bersifat padat modal di wilayah ini juga cukup besar. Sebaliknya, rendahnya ICOR di Kota Yogyakarta antara lain disebabkan oleh peranan jasa keuangan dan asuransi yang cukup besar di wilayah ini. Seperti diketahui bahwa lapangan usaha ini mempunyai ICOR yang relatif kecil. Sementara industri yang dominan di Kota Yogyakarta adalah industri makanan dan minuman yang sebagian besar merupakan industri kecil/rumah tangga dengan barang modal yang relatif kecil.

Rata-rata ICOR kabupaten/kota di DIY selama periode 2011-2015 hampir sejalan dengan nilai ICOR kabupaten/kota pada tahun 2015. Selama periode

pengamatan, rata-rata ICOR Kabupaten Kulonprogo mempunyai nilai tertinggi yaitu sebesar 6,51; diikuti oleh Kabupaten Sleman 6,41; Kabupaten Gunungkidul 5,65; Kabupaten Bantul 4,72; dan terendah Kota Yogyakarta sebesar 3,80. Tingginya ICOR di Kabupaten Kulonprogo seiring dengan persiapan pembangunan bandara di wilayah tersebut, sehingga perbaikan infrastruktur berupa jalan semakin ditingkatkan.

Tabel 4.7. ICOR Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2011-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014*	2015**	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	6,95	6,76	6,06	6,49	6,29	6,51
Bantul	4,84	4,62	4,50	4,76	4,90	4,72
Gunungkidul	5,93	5,52	5,36	5,87	5,55	5,65
Sleman	6,56	6,16	6,05	6,60	6,67	6,41
Yogyakarta	3,94	3,68	3,59	3,91	3,87	3,80
D.I. Yogyakarta	5.66	5.48	5.36	5.71	5.92	5,62

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Angka ICOR dengan pendekatan investasi hanya terdiri dari PMTB saja menghasilkan angka ICOR dengan urutan yang hampir sama. Selama periode 2011-2015 rata-rata ICOR tertinggi terjadi Kabupaten Kulonprogo. Sebaliknya, Kabupaten Bantul mempunyai ICOR terendah.

Tabel 4.8. ICOR Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2011-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014*	2015**	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	6,80	6,61	5,93	6,35	6,16	6,37
Bantul	4,65	4,45	4,34	4,58	4,71	4,55
Gunungkidul	5,67	5,28	5,14	5,61	5,29	5,40
Sleman	6,24	5,88	5,78	6,30	6,40	6,12
Yogyakarta	4,38	4,71	4,63	4,79	4,79	4,66
D.I. Yogyakarta	5.41	5.26	5.14	5.47	5.67	5,39

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

4.4.2. ICOR menurut Lapangan Usaha

4.4.2.1. ICOR menurut Lapangan Usaha Tahunan

ICOR tahunan dihitung dengan lag 0 artinya investasi yang ditanam pada tahun t akan menghasilkan nilai tambah pada tahun yang sama juga. Investasi yang dimaksud dalam penghitungan ini, sudah memperhitungkan perubahan inventori (Tabel 4.9).

Tabel 4.9. ICOR Lapangan Usaha Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2011-2015

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.79	2.18	1.95	1.87	2.37
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	1.82	2.20	1.94	1.98	2.33
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	4.23	4.23	4.09	3.01	3.04
c. Perikanan	1.57	1.57	1.52	1.58	1.80
2. Pertambangan & Penggalian	3.16	3.16	3.06	3.19	3.62
3. Industri Pengolahan	5.34	4.79	5.05	5.67	5.57
4. Pengadaan Listrik & Gas	14.75	14.79	14.28	14.87	15.28
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5.67	5.68	5.49	5.72	6.50
6. Konstruksi	4.62	4.63	4.48	4.66	5.30
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4.27	4.35	4.21	4.41	4.90
8. Transportasi & Pergudangan	14.41	14.47	13.29	12.63	13.60
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6.04	5.97	6.02	6.53	7.11
a. Penyediaan Akomodasi	3.84	3.85	3.72	3.88	4.41
b. Penyediaan Makan Minum	6.89	6.89	6.67	6.94	7.90
10. Informasi & Komunikasi	5.75	5.75	5.56	5.79	6.45
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2.90	3.14	2.43	2.63	3.13
a. Jasa Perantara Keuangan	2.34	2.35	2.27	2.36	2.69
b. Lainnya	4.34	4.31	4.16	4.45	4.94
12. Real Estate	4.61	4.62	4.46	4.65	4.85
13. Jasa Perusahaan	5.31	5.32	5.14	5.36	6.09
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6.69	6.70	6.47	6.74	7.67
15. Jasa Pendidikan	4.93	4.93	4.77	4.97	5.65
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5.30	5.31	5.13	5.35	6.08
17. Jasa lainnya	5.12	5.13	4.96	5.16	5.87
PDRB	5.66	5.48	5.36	5.71	5.92

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: * Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa angka ICOR DIY bervariasi menurut lapangan usaha. Namun demikian, ada beberapa kecenderungan yang bisa diamati. Pertama, secara umum ICOR pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang mengindikasikan ekonomi DIY semakin tidak efisien. Pada tahun 2011 ICOR masih relatif tinggi yaitu sebesar 5,66, kemudian terus menurun menjadi 5,48 pada tahun 2012 dan 5,36 pada tahun 2013. Kondisi perekonomian yang semakin baik menyebabkan pertumbuhan nilai tambah mengalami akselerasi dari 5,21 persen pada tahun 2011 menjadi 5,47 persen di tahun 2013. Kembali membaiknya angka ICOR pada tahun 2011, 2012, dan 2013 disebabkan oleh upaya yang cukup keras dari pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan disamping kondisi makroekonomi perekonomian nasional dan regional yang semakin kondusif sehingga perekonomian DIY mampu tumbuh cukup baik.

Kedua, lapangan usaha pertanian; pertambangan dan penggalian; serta jasa keuangan dan asuransi mempunyai ICOR yang relatif kecil dibandingkan lapangan usaha lainnya. Untuk lapangan usaha pertanian rendahnya angka ICOR disebabkan oleh proses produksi yang pendek dan kecilnya proporsi investasi dibanding biaya antara (*intermediate cost*) dalam struktur ongkos usaha taninya. Demikian juga untuk pertambangan dan penggalian, proses produksinya juga relatif pendek dan tidak memerlukan investasi yang besar karena pada umumnya kegiatan penggalian di DIY berupa penggalian batu dan pasir. Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi juga tidak memerlukan barang modal yang relatif besar dalam proses produksinya atau bisa dikatakan tidak bersifat kapital intensive.

Ketiga, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha pengangkutan dan pergudangan mempunyai ICOR relatif tinggi, hal ini berkaitan erat dengan karakter lapangan usaha tersebut yang bersifat padat modal dan biasanya investasinya bersifat jangka panjang.

Keempat, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib relatif kurang efisien yang tercermin dari tingginya ICOR. Hal ini kemungkinan karena investasi pemerintah biasanya pada fasilitas publik seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang tujuan utamanya bukan mencari profit.

Sebagai bahan perbandingan, pada Tabel 4.10 disajikan hasil perhitungan angka ICOR Lapangan Usaha tahunan 2011-2015 dengan pendekatan investasi hanya terdiri dari komponen PMTB saja. Secara umum, angka ICOR dengan pendekatan ini menghasilkan angka yang lebih rendah.

Tabel 4.10. ICOR Lapangan Usaha Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan Pendekatan Investasi=PMTB, 2011-2015

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.71	2.09	1.87	1.80	2.26
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	1.74	2.10	1.86	1.90	2.23
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	4.05	4.06	3.93	2.89	2.91
c. Perikanan	1.50	1.51	1.46	1.52	1.72
2. Pertambangan & Penggalian	3.02	3.04	2.94	3.05	3.47
3. Industri Pengolahan	5.09	4.58	4.83	5.41	5.31
4. Pengadaan Listrik & Gas	14.12	14.20	13.71	14.25	14.64
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5.43	5.45	5.27	5.48	6.23
6. Konstruksi	4.43	4.44	4.30	4.47	5.08
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4.09	4.17	4.05	4.22	4.69
8. Transportasi & Pergudangan	13.79	13.88	12.76	12.10	13.03
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5.78	5.73	5.78	6.26	6.81
a. Penyediaan Akomodasi	3.68	3.69	3.57	3.71	4.22
b. Penyediaan Makan Minum	6.59	6.62	6.40	6.65	7.57
10. Informasi & Komunikasi	5.50	5.52	5.34	5.55	6.18
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2.78	3.01	2.34	2.52	3.00
a. Jasa Perantara Keuangan	2.24	2.25	2.18	2.26	2.57
b. Lainnya	4.15	4.13	4.00	4.26	4.73
12. Real Estate	4.41	4.43	4.29	4.46	4.65
13. Jasa Perusahaan	5.09	5.11	4.94	5.13	5.84
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6.40	6.43	6.22	6.46	7.35
15. Jasa Pendidikan	4.72	4.74	4.58	4.76	5.42
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5.07	5.09	4.93	5.12	5.82
17. Jasa lainnya	4.90	4.92	4.76	4.95	5.63
PDRB	5.41	5.26	5.14	5.47	5.67

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), pada tahun 2015 ICOR Daerah Istimewa Yogyakarta

mencapai angka tertinggi ke-empat di bawah Provinsi NTT, DKI Jakarta, dan Jawa Barat dengan ICOR masing-masing sebesar 9,85; 8,18; dan 6,30 (Tabel 4.11). Relatif tingginya ICOR Daerah Istimewa Yogyakarta dibanding provinsi lain tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh: (1) pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang hampir selalu di bawah Provinsi lain di Jabalnusra selama lima tahun terakhir, (2) dari sisi efisiensi investasi, belum sebgus provinsi lain di Jawa, baik dari segi nilainya, infrastruktur, akses perijinan dan penataan kawasannya, dan (3) skala usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh perusahaan mikro kecil (UMK) sehingga jika dilihat tingkat produktivitas/efisiensinya biasanya lebih rendah dari pada perusahaan yang mempunyai skala usaha menengah/besar (UMB) dalam hal penerapan teknologi produksi. Angka ICOR DKI yang relatif tinggi bisa disebabkan oleh pengembangan lapangan usaha yang lebih bersifat padat modal.

Tabel 4.11. ICOR di Provinsi Jabalnusra (Investasi = PMTB + Δ Inventori), 2011-2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI	7,40	7,85	8,39	8,36	8,18
JABAR	4,85	5,40	4,93	6,42	6,30
JATENG	6,74	6,81	6,58	6,16	5,67
DIY	5,65	5,48	5,36	5,71	5,92
JATIM	4,70	4,50	4,85	5,45	5,74
BANTEN	5,03	5,29	5,12	5,88	5,88
BALI	5,50	5,43	5,46	5,16	5,65
NTB	-5,82	-20,61	6,48	6,61	1,66
NTT	6,64	7,37	7,04	8,85	9,85
Indonesia	5,75	6,15	6,47	7,16	7,38

Sumber: BPS (Diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Berdasarkan hasil penghitungan ICOR dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB dan perubahan inventori diperoleh urutan angka ICOR di Provinsi Jabalnusra sebagai berikut: pada tahun 2011, 2012, dan 2015 berada di urutan ke-4; dan pada tahun 2013-2014 berada pada urutan ke-6 (Tabel 4.11). Demikian pula penghitungan ICOR dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB saja menghasilkan urutan angka ICOR yang relatif hampir sama dengan kondisi memperhitungkan perubahan inventori (Tabel 4.12).

Tabel 4.12. ICOR di Provinsi Jabalnusra (Investasi = PMTB), 2011-2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI	7,37	7,81	8,34	8,32	8,14
JABAR	4,16	4,32	4,12	5,31	5,35
JATENG	5,66	5,77	5,98	5,74	5,56
DIY	5,41	5,26	5,14	5,47	5,67
JATIM	4,54	4,49	4,83	4,93	5,30
BANTEN	4,65	4,87	4,84	5,71	5,83
BALI	5,33	5,22	5,33	5,06	5,63
NTB	-7,31	-21,19	6,48	6,50	1,65
NTT	5,92	6,26	6,67	8,54	9,60
Indonesia	5,47	5,75	6,18	6,77	7,10

Sumber : BPS (diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

4.4.2.2. ICOR Lapangan Usaha Metode Akumulasi

Sebagaimana diketahui koefisien ICOR adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Pada metode akumulasi ini baik investasi maupun tambahan output merupakan akumulasi selama periode 2011 sampai dengan 2015. Dalam penghitungan ini dilakukan dengan dua pendekatan investasi **dengan** dan **tanpa** memperhitungkan perubahan inventori.

Hasil perhitungan besaran koefisien ICOR Lapangan Usaha dengan metode akumulasi pada periode 2011-2015 di DIY baik melalui pendekatan investasi dengan atau tanpa perubahan inventori disajikan pada Tabel 4.13. Besaran koefisien ICOR DIY secara total dengan metode akumulasi selama periode 2011-2015 mencapai 5,63. Hal ini menggambarkan untuk memperoleh penambahan output senilai satu juta rupiah dalam rentang periode tersebut dibutuhkan tambahan investasi sebanyak 5,63 juta rupiah. Besaran koefisien ICOR mencerminkan produktivitas dari pengeluaran barang modal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target yang diinginkan. Semakin kecil koefisien ICOR menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan semakin efisien.

Tercatat lapangan usaha yang mempunyai koefisien ICOR terkecil adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan peternakan, sebesar 2,39. Artinya setiap penambahan Rp. 1 juta output memerlukan investasi sebesar Rp. 2,39 juta. Hal ini

menunjukkan bahwa produktivitas investasi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan peternakan relatif cukup tinggi, karena sebagian besar komoditas pertanian mempunyai proses produksi kurang dari satu tahun, dan sebagian besar inputnya menggunakan input antara (*intermediate cost*) yang habis dipakai kurang dari satu tahun seperti: benih/bibit, pupuk, dan obat-obatan.

Tabel 4.13. ICOR Lapangan Usaha Metode Akumulasi, Lag=0 Dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori, 2011-2015

Lapangan Usaha	PMTB + Δ Inventori	PMTB
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2.39	2.29
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	2.40	2.30
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	3.21	3.08
c. Perikanan	1.61	1.54
2. Pertambangan & Penggalian	3.14	3.01
3. Industri Pengolahan	5.43	5.18
4. Pengadaan Listrik & Gas	14.63	14.03
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5.89	5.65
6. Konstruksi	4.74	4.54
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4.45	4.27
8. Transportasi & Pergudangan	13.65	13.09
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6.35	6.09
a. Penyediaan Akomodasi	3.94	3.78
b. Penyediaan Makan Minum	7.06	6.77
10. Informasi & Komunikasi	5.84	5.60
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2.79	2.68
a. Jasa Perantara Keuangan	2.40	2.30
b. Lainnya	4.47	4.29
12. Real Estate	4.66	4.47
13. Jasa Perusahaan	5.50	5.28
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6.87	6.58
15. Jasa Pendidikan	5.10	4.89
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5.45	5.23
17. Jasa lainnya	5.33	5.11
PDRB	5.63	5.39

Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah)

Selanjutnya, lapangan usaha yang mempunyai koefisien ICOR terkecil kedua adalah jasa keuangan dan asuransi, dengan nilai ICOR 2,79. Artinya, untuk

meningkatkan output senilai Rp. 1 juta diperlukan tambahan investasi sebesar Rp. 2,79 juta. Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi juga tidak memerlukan barang modal yang relatif besar dalam proses produksinya atau bisa dikatakan tidak bersifat kapital intensive.

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian, sebesar 3,14. Artinya setiap penambahan Rp. 1 juta output memerlukan investasi sebesar Rp. 3,14 juta. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas investasi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian relatif cukup tinggi. Sebagian besar aktivitas pertambangan dan penggalian di DIY berupa penggalian batu dan pasir yang merupakan usaha mikro dan kecil dan tidak memerlukan barang modal yang besar.

Lapangan usaha yang mempunyai angka ICOR pada kisaran 4-7 adalah industri pengolahan (5,43); pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (5,89); konstruksi (4,74); perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (4,45); penyediaan akomodasi dan makan minum (6,35); informasi dan komunikasi (5,84); real estate (4,66); jasa perusahaan (5,50); administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (6,87); jasa pendidikan (5,10); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (5,45); serta jasa lainnya (5,33). Sedangkan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha pengangkutan dan pergudangan mempunyai ICOR yang relatif tinggi yaitu masing-masing sebesar 14,63 dan 13,65.

4.4.2.3. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar

Secara umum angka ICOR dengan metode standar seperti pada Tabel 4.14 tidak jauh berbeda dengan hasil penghitungan menggunakan metode akumulasi (Tabel 4.13). Untuk beberapa lapangan usaha nilai ICOR dengan metode standar lebih tinggi dibandingkan dengan hasil perhitungan dengan metode akumulasi. Sedangkan untuk beberapa lapangan usaha lainnya justru sebaliknya. Namun perbedaan hasil penghitungan nilai ICOR dengan kedua metode tidak terlalu besar. Pada metode akumulasi akan mengeliminir terjadinya angka ekstrim pada suatu tahun tertentu. Sedangkan metode standar tidak mampu membebaskan diri dari pengaruh angka yang sangat ekstrim dan dapat menyebabkan bias. Meskipun demikian, metode standar dapat mengidentifikasi kegiatan lapangan usaha mana

saja yang kurang efisien, dan memungkinkan dapat diperhitungkannya kapasitas produksi terpasang yang berlebih atau belum dimanfaatkan secara penuh.

Pemilihan metode penghitungan ICOR tergantung pada asumsi yang digunakan atau prediksi keadaan riil di lapangan. Sebagai contoh karakteristik dari masing-masing lapangan usaha, teknologi yang diterapkan, manajemen, kondisi pasar, dan sebagainya. Selain itu, faktor daya tarik masing-masing lapangan usaha di mata para investor, dan berbagai kebijakan serta peraturan pemerintah juga mewarnai perbedaan koefisien ICOR pada masing-masing lapangan usaha.

Angka ICOR pada Tabel 4.14 merupakan hasil penghitungan dengan menggunakan metode standar lag=0 dan diasumsikan produksi berada pada kondisi *full capacity*, jadi investasi yang ditanamkan sepenuhnya digunakan untuk menaikkan output. Pendekatan investasi yang digunakan pada perhitungan metode ini adalah dengan dan tanpa memperhitungkan perubahan inventori.

Berdasarkan pendekatan investasi sama dengan PMTB plus perubahan inventori, selama periode 2011-2015 diperoleh ICOR DIY sebesar 5,62. Jika ditinjau menurut lapangan usaha, maka lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; jasa keuangan dan asuransi; serta pertambangan dan penggalian merupakan lapangan usaha ekonomi yang mempunyai ICOR relatif rendah. Lapangan usaha tersebut lebih bersifat *labor intensive*. Sedangkan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha pengangkutan dan perdagangan merupakan lapangan usaha dengan perolehan ICOR relatif tinggi, yang berarti lebih bersifat *capital intensive*.

Koefisien ICOR lapangan usaha pertanian yang relatif kecil bisa disebabkan oleh proses produksi pertanian masih sangat tergantung kepada alam. Peranan sumber daya alam masih cukup besar dalam menentukan produksi/output. Mekanisasi pertanian masih terbatas dan biaya produksi masih didominasi oleh *intermediate cost*, yaitu input yang habis dalam satu kali produksi. Demikian juga halnya dengan lapangan usaha pertambangan dan penggalian di DIY yang bersifat *labor intensive* karena pada umumnya merupakan usaha mikro/kecil dan tidak menggunakan barang modal yang besar.

Sedangkan tingginya angka perolehan ICOR untuk lapangan usaha pengadaan listrik dan gas karena investasinya biasanya bersifat berjangka panjang dan padat modal. Akibatnya nilai investasi yang relatif besar pada saat ini belum

tentu langsung diikuti oleh naiknya nilai tambah kedua lapangan usaha tersebut. Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas kadang-kadang memerlukan waktu yang panjang, bisa mencapai 30 tahun untuk mencapai *break even point (BEP)*. Untuk lapangan usaha pengangkutan dan pergudangan, tingginya angka ICOR disebabkan oleh besarnya nilai investasi yang diperlukan untuk pembelian mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya. Lapangan usaha ini termasuk dalam lapangan usaha ekonomi yang bersifat padat modal.

Tabel 4.14. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar, Lag=0 dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori, 2011-2015

Lapangan Usaha	PMTB + Δ Inventori	PMTB
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,03	1,95
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	2,05	1,97
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	3,72	3,57
c. Perikanan	1,61	1,54
2. Pertambangan & Penggalian	3,24	3,11
3. Industri Pengolahan	5,28	5,04
4. Pengadaan Listrik & Gas	14,79	14,18
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,81	5,57
6. Konstruksi	4,74	4,54
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,43	4,24
8. Transportasi & Pergudangan	13,68	13,11
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,33	6,07
a. Penyediaan Akomodasi	3,94	3,78
b. Penyediaan Makan Minum	7,06	6,77
10. Informasi & Komunikasi	5,86	5,62
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2,85	2,73
a. Jasa Perantara Keuangan	2,40	2,30
b. Lainnya	4,44	4,26
12. Real Estate	4,64	4,45
13. Jasa Perusahaan	5,44	5,22
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6,85	6,57
15. Jasa Pendidikan	5,05	4,84
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5,43	5,21
17. Jasa lainnya	5,25	5,03
PDRB	5,62	5,39

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Hasil penghitungan koefisien ICOR dengan asumsi investasi yang dilakukan pada tahun tertentu baru akan menghasilkan output yang diinginkan setelah satu tahun dan dua tahun berikutnya ditunjukkan pada Tabel 4.15 dan Tabel 4.16. Secara total koefisien ICOR dengan *time lag* 1 dan *time lag* 2 mengalami penurunan, yaitu dari 5,62 pada lag 0 menjadi 5,52 pada lag 1, dan menjadi 5,33 pada lag 2. Hal ini mengindikasikan produktivitas kapital yang semakin meningkat.

Tabel 4.15. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar Lag=0, Lag=1, dan Lag=2, dengan Pendekatan Investasi=PMTB + Perubahan Inventori, 2011-2015

Lapangan Usaha	Lag-0	Lag-1	Lag-2
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,03	2,29	2,58
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	2,05	2,26	2,51
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	3,72	4,00	4,31
c. Perikanan	1,61	1,71	1,83
2. Pertambangan & Penggalian	3,24	2,93	2,56
3. Industri Pengolahan	5,28	4,61	3,92
4. Pengadaan Listrik & Gas	14,79	12,63	10,41
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,81	4,91	4,02
6. Konstruksi	4,74	4,38	3,98
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,43	4,56	4,69
8. Transportasi & Pergudangan	13,68	12,78	11,81
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,33	6,86	7,43
a. Penyediaan Akomodasi	3,94	4,26	4,61
b. Penyediaan Makan Minum	7,06	7,67	8,29
10. Informasi & Komunikasi	5,86	5,24	4,58
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2,85	2,77	2,68
a. Jasa Perantara Keuangan	2,40	2,30	2,19
b. Lainnya	4,44	4,35	4,21
12. Real Estate	4,64	4,55	4,40
13. Jasa Perusahaan	5,44	5,34	5,17
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6,85	7,13	7,38
15. Jasa Pendidikan	5,05	5,31	5,54
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5,43	5,71	5,96
17. Jasa lainnya	5,25	5,51	5,76
PDRB	5,62	5,52	5,33

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Tabel 4.16. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar Lag=0, Lag=1, dan Lag=2, dengan Pendekatan Investasi=PMTB, 2011-2015

Lapangan Usaha	Lag-0	Lag-1	Lag-2
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,95	2,16	2,46
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	1,97	2,13	2,37
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	3,57	3,74	4,16
c. Perikanan	1,54	1,62	1,75
2. Pertambangan & Penggalian	3,11	2,82	2,46
3. Industri Pengolahan	5,04	4,20	3,57
4. Pengadaan Listrik & Gas	14,18	12,11	9,98
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,57	4,68	3,83
6. Konstruksi	4,54	4,14	3,76
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,24	4,53	4,66
8. Transportasi & Pergudangan	13,11	12,07	11,15
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,07	6,71	7,26
a. Penyediaan Akomodasi	3,78	4,14	4,49
b. Penyediaan Makan Minum	6,77	7,54	8,15
10. Informasi & Komunikasi	5,62	5,00	4,37
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2,73	2,62	2,53
a. Jasa Perantara Keuangan	2,30	2,15	2,04
b. Lainnya	4,26	4,11	3,98
12. Real Estate	4,45	4,29	4,16
13. Jasa Perusahaan	5,22	5,04	4,88
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6,57	6,73	6,97
15. Jasa Pendidikan	4,84	5,27	5,50
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5,21	5,66	5,92
17. Jasa lainnya	5,03	5,47	5,72
PDRB	5,39	5,27	5,08

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Jika dibandingkan dengan hasil penghitungan ICOR standar dengan lag=0, ada sepuluh (10) lapangan usaha yang mengalami penurunan ICOR dengan lag=1 maupun lag=2 yaitu: lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha industri pengolahan; lapangan usaha pengadaan listrik dan gas; lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; lapangan usaha

konstruksi; lapangan usaha pengangkutan dan pergudangan; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha real estate; serta lapangan usaha jasa perusahaan. Kesepuluh lapangan usaha tersebut mengalami peningkatan produktivitas kapital setelah satu atau dua tahun.

Sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan produktivitas kapital dicerminkan dengan kenaikan koefisien ICOR yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

4.4.2.4. Keterbandingan ICOR

Perbandingan hasil perhitungan ICOR dengan metode standar dan metode akumulasi disajikan pada Tabel 4.17. Jika hasil perhitungan ICOR dibandingkan antara metode standar dan akumulasi pada periode 2011-2015 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Perbedaan hasil penghitungan yang agak besar terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian serta lapangan usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu. Seperti diketahui lapangan usaha kehutanan merupakan kegiatan yang memiliki proses produksi relatif cukup panjang, sejak penanaman hingga dapat dipetik hasilnya memerlukan waktu sekitar 10-15 tahun. Sementara perbedaan hasil perhitungan ICOR pada lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terutama terjadi pada komoditas hortikultura tahunan. Komoditas tersebut memerlukan waktu yang relatif panjang untuk dipetik hasilnya.

Perkembangan nilai tambah menurut lapangan usaha dengan tahun dasar 2010 disajikan pada Tabel 4.17. Dari tabel tersebut terlihat bahwa lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha informasi dan komunikasi; serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial berkembang relatif lebih pesat dibandingkan dengan lapangan usaha yang lain. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks perkembangan yang relatif lebih tinggi yaitu sebesar 150,3 untuk lapangan

usaha jasa keuangan dan asuransi; 143,8 untuk lapangan usaha informasi dan komunikasi; dan 143,5 untuk lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dengan angka indeks perkembangan di atas 140 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun nilai tambah lapangan usaha tersebut sudah meningkat lebih dari 40 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2010. Sedangkan untuk lapangan usaha yang lain mempunyai nilai indeks perkembangan di bawah 140.

Tabel 4.17. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar dan Akumulasi, Indeks Perkembangan Konstan, dan LPE Rata-rata, 2011-2015

Lapangan Usaha	ICOR 2011-2015				Indeks Perkem- bangan Konstan 2015, 2010=100	LPE Rata- rata 2011- 2015
	Standar			Akumu- lasi		
	Lag-0	Lag-1	Lag-2			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,03	2,29	2,58	2,39	106,2	1.94
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	2,05	2,26	2,51	2,40	105,4	1.80
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	3,72	4,00	4,31	3,21	107,8	1.83
c. Perikanan	1,61	1,71	1,83	1,61	124,7	5.59
2. Pertambangan & Penggalian	3,24	2,93	2,56	3,14	115,9	1.95
3. Industri Pengolahan	5,28	4,61	3,92	5,43	115,6	2.34
4. Pengadaan Listrik & Gas	14,79	12,63	10,41	14,63	126,3	4.57
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,81	4,91	4,02	5,89	112,0	2.80
6. Konstruksi	4,74	4,38	3,98	4,74	126,6	4.82
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,43	4,56	4,69	4,45	134,9	6.44
8. Transportasi & Pergudangan	13,68	12,78	11,81	13,65	124,4	4.59
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,33	6,86	7,43	6,35	136,6	6.63
a. Penyediaan Akomodasi	3,94	4,26	4,61	3,94	149,2	8.08
b. Penyediaan Makan Minum	7,06	7,67	8,29	7,06	134,1	6.31
10. Informasi & Komunikasi	5,86	5,24	4,58	5,84	143,8	7.03
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2,85	2,77	2,68	2,79	150,3	7.80
a. Jasa Perantara Keuangan	2,40	2,30	2,19	2,40	157,8	9.06
b. Lainnya	4,44	4,35	4,21	4,47	132,3	4.51
12. Real Estate	4,64	4,55	4,40	4,66	135,7	6.76
13. Jasa Perusahaan	5,44	5,34	5,17	5,50	137,2	6.53
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6,85	7,13	7,38	6,87	131,5	5.87
15. Jasa Pendidikan	5,05	5,31	5,54	5,10	137,1	6.25
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5,43	5,71	5,96	5,45	143,5	7.74
17. Jasa lainnya	5,25	5,51	5,76	5,33	132,8	5.60
PDRB	5,62	5,52	5,33	5,63	129,0	5.24

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

4.5. Kebutuhan dan Pilihan Investasi

Kebutuhan investasi selama periode 2016-2020 dihitung berdasarkan angka ICOR dengan metode standar untuk periode 2011-2015 dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB plus perubahan inventori (lihat Tabel 4.7). Target pertumbuhan ekonomi yang digunakan diperoleh dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2017 dan hasil proyeksi berdasarkan data pertumbuhan ekonomi pada periode sebelumnya. Hasil penghitungan kebutuhan investasi berdasarkan target pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY dan masing-masing kabupaten/kota disajikan pada Tabel 18 sampai dengan Tabel 23.

Selama periode 2011-2015, koefisien ICOR Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 5,62 dan asumsi laju inflasi sebesar 6,75 persen per tahun. Target pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2016 sebesar 5,38 persen. Dengan demikian, diperlukan investasi sebesar 37,22 triliun rupiah. Pada tahun 2017 target pertumbuhan ekonomi 5,46 persen, sehingga diperlukan investasi sebesar 42,89 triliun rupiah. Pada tahun 2018 untuk target pertumbuhan 5,58 persen dan diperlukan investasi sebesar 48,87 triliun rupiah. Pada tahun 2019 untuk target pertumbuhan 5,69 persen diperlukan investasi sebesar 56,19 triliun rupiah. Dan pada tahun 2020, untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 5,82 persen diperlukan investasi sebesar 64,80 triliun rupiah.

Tabel 4.18. Kebutuhan Investasi untuk Target Pertumbuhan Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016-2020

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	5.38	87,952,318	4,490,744	28.71	25,253,466	37,219,980
2017	5.46	92,754,158	4,801,840	29.11	27,002,897	42,485,753
2018	5.58	97,928,555	5,174,398	29.71	29,097,958	48,873,482
2019	5.69	103,501,29	5,572,740	30.28	31,338,014	56,190,133
2020	5.82	109,521,21	6,019,920	30.91	33,852,712	64,797,741

Catatan:

ICOR Standar 2011-2015	5,62
Implisit Investasi 2015	138,06
PDRB Konstan 2015	25.824.098
Asumsi Laju Implisit	6,75

Tabel 4.19. Kebutuhan Investasi untuk Target Pertumbuhan Kabupaten Kulonprogo, 2016-2020

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	5,04	6.598.06	316.498	31,23	2.060.459	2.940.903
2017	5,23	6.943.06	345.004	32,35	2.246.040	3.391.449
2018	5,42	7.319.32	376.260	33,47	2.449.524	3.912.914
2019	5,61	7.729.91	410.583	34,58	2.672.972	4.517.145
2020	5,80	8.178.24	448.329	35,69	2.918.706	5.218.082

Catatan:

ICOR Standar 2011-2015 6,51

Implisit Investasi 2015 134,92

PDRB Konstan 2015 6.281.566

Asumsi Laju Implisit 5,79

Di Kabupaten Kulonprogo ICOR rata-rata selama periode 2011-2015 sebesar 6,51 dan asumsi laju inflasi sebesar 5,79 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,04 persen pada tahun 2016, maka diperlukan investasi sebesar 2,94 triliun rupiah. Pada tahun 2017 target pertumbuhan ekonomi Kulonprogo sebesar 5,23 persen, sehingga diperlukan investasi sebesar 3,39 triliun rupiah. Nilai investasi yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada tahun 2019 dan 5,80 persen pada tahun 2020 masing-masing sebesar 4,52 triliun rupiah dan 5,22 triliun rupiah.

Tabel 4.20. Kebutuhan Investasi untuk Target Pertumbuhan Kabupaten Bantul, 2016-2020

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	5,44	16.459.862	849.348	24,36	4.010.091	5.666.912
2017	5,56	17.374.641	914.779	24,86	4.319.017	6.457.646
2018	5,68	18.360.983	986.342	25,36	4.656.894	7.366.865
2019	5,72	19.411.804	1.050.821	25,56	4.961.322	8.303.874
2020	5,92	20.561.601	1.149.797	26,40	5.428.628	9.613.252

Catatan:

ICOR Standar 2011-2015 4,72

Implisit Investasi 2015 133,57

PDRB Konstan 2015 15.610.514

Asumsi Laju Implisit 5,80

Di Kabupaten Bantul dengan ICOR rata-rata lima tahun terakhir sebesar 4,72 dan asumsi laju inflasi sebesar 5,80 persen, maka untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen pada tahun 2016 diperlukan investasi sebesar 5,67 triliun rupiah. Pada tahun 2017-2020 target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai secara berturut-turut adalah 5,56 persen, 5,68 persen, 5,72 persen, dan 5,92 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut maka diperlukan tambahan investasi masing-masing sebesar 6,46 triliun rupiah (2017), 7,37 triliun rupiah (2018), 8,30 triliun rupiah (2019), dan 9,61 triliun rupiah (2020).

Selama periode 2011-2015, rata-rata ICOR di Kabupaten Gunungkidul sebesar 5,12 dan asumsi laju inflasi sebesar 6,41 persen. Pada tahun 2016 target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sebesar 5,01 persen. Dengan demikian, diperlukan investasi sebesar 4,60 triliun rupiah. Untuk mencapai target pertumbuhan 5,34 persen pada tahun 2018 diperlukan investasi sebesar 6,13 triliun rupiah. Nilai investasi yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,57 persen pada tahun 2019 dan 5,74 persen pada tahun 2020 adalah sebesar 7,17 triliun rupiah dan 8,30 triliun rupiah.

Tabel 4.21. Kebutuhan Investasi untuk Target Pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	5,01	11.710.387	558.699	26,94	3.154.403	4.599.969
2017	5,12	12.309.958	599.570	27,50	3.385.161	5.252.856
2018	5,34	12.967.233	657.275	28,62	3.710.959	6.127.465
2019	5,57	13.689.905	722.673	29,80	4.080.195	7.168.926
2020	5,74	14.476.118	786.213	30,66	4.438.940	8.299.099

Catatan:

ICOR Standar 2011-2015	5,65
Implisit Investasi 2015	137,04
PDRB Konstan 2015	11.151.688
Asumsi Laju Implisit	6,41

Di Kabupaten Sleman ICOR rata-rata lima tahun terakhir sebesar 6,41 dan asumsi laju inflasi sebesar 6,72 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,93 persen pada tahun 2016 diperlukan investasi sebesar 14,27 triliun rupiah. Untuk mencapai target pertumbuhan 5,46 persen pada tahun 2017

diperlukan investasi sebesar 16,23 triliun rupiah. Sementara itu, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56 persen dan 5,60 persen pada tahun 2019 dan 2020 diperlukan investasi masing-masing sebesar 20,94 triliun rupiah dan 23,76 triliun rupiah.

Tabel 4.22. Kebutuhan Investasi untuk Target Pertumbuhan Kabupaten Sleman, 2016-2020

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	5,40	29.680.296	1.520.622	32,83	9.743.077	14.268.806
2017	5,46	31.300.841	1.620.544	33,17	10.383.305	16.227.571
2018	5,50	33.022.387	1.721.546	33,40	11.030.455	18.396.607
2019	5,56	34.858.431	1.836.045	33,75	11.764.081	20.937.686
2020	5,60	36.810.504	1.952.072	33,98	12.507.503	23.755.693

Catatan:

ICOR Standar 2011-2015	6,41
Implisit Investasi 2015	137,24
PDRB Konstan 2015	28.159.674
Asumsi Laju Implisit	6,72

Tabel 4.23. Kebutuhan Investasi untuk Target Pertumbuhan Kota Yogyakarta, 2016-2020

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	5,59	23.666.041	1.253.865	20,12	4.762.189	6.846.000
2017	5,62	24.996.846	1.330.805	20,22	5.054.404	7.722.355
2018	5,77	26.439.370	1.442.524	20,72	5.478.717	8.896.275
2019	5,91	28.002.274	1.562.904	21,20	5.935.918	10.243.934
2020	6,05	29.696.894	1.694.620	21,67	6.436.177	11.804.739

Catatan:

ICOR Standar 2011-2015	3,80
Implisit Investasi 2015	135,26
PDRB Konstan 2015	22.412.176
Asumsi Laju Implisit	6,28

Di Kota Yogyakarta dengan ICOR rata-rata selama periode 2011-2015 sebesar 3,80 dan asumsi laju inflasi sebesar 6,28 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,59 persen pada tahun 2016 diperlukan investasi

sebesar 6,85 triliun rupiah. Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahunan yang ingin dicapai pada periode 2017-2020 adalah sebesar 5,62 persen (2017), 5,77 persen (2018), 5,91 persen (2019), dan 6,05 persen (2020). Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan tambahan investasi masing-masing sebesar 7,72 triliun rupiah (2017), 8,90 triliun rupiah (2018), 10,24 triliun rupiah (2019), dan 11,80 triliun rupiah (2020).

Kebutuhan investasi tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, karena anggaran pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota relatif terbatas. Untuk itu diharapkan peran swasta dan rumah tangga dalam penanaman modal di wilayah provinsi D.I. Yogyakarta. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk swasta dan rumah tangga baik dari dalam maupun luar provinsi serta luar negeri.

Keputusan untuk melakukan investasi pada suatu sektor ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa hal berikut merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan investasi. Pertama, Lapangan Usaha dengan koefisien ICOR kecil akan mendapat prioritas untuk melakukan investasi. Dari sisi ekonomi, lapangan usaha ini menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Kedua, lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja yang besar, meskipun mempunyai angka ICOR yang relatif tinggi perlu mendapat prioritas investasi. Investasi pada lapangan usaha ini akan membantu mengurangi masalah pengangguran di wilayah tersebut. Ketiga, lapangan usaha yang mempunyai *backward* dan *forward linkages* tinggi juga perlu dipertimbangkan untuk mendapat prioritas investasi karena mempunyai *multiplier effect* yang relatif lebih besar. Investasi pada lapangan usaha ini akan menciptakan pasar bagi komoditi lainnya, sehingga akan menggerakkan perekonomian wilayah. Keempat, lapangan usaha yang mempunyai potensi pasar cukup besar. Selain itu, pilihan investasi juga harus mempertimbangkan kepemilikan sumber daya (*resource endowments*) lokal, kebijakan pemerintah mengenai konservasi sumber daya alam, dan faktor lainnya.

Jika dilihat dari besaran ICOR, maka lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha penyediaan akomodasi; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha real estate; dan lapangan usaha konstruksi adalah lapangan usaha dengan

angka ICOR relatif rendah. Sedangkan jika dilihat dari serapan tenaga kerja, maka lapangan usaha perdagangan, pertanian, jasa-jasa, dan industri merupakan lapangan usaha dengan kemampuan serapan tenaga kerja yang relatif cukup tinggi (Tabel 4.24). Sedangkan jika dilihat dari dampak penggandanya (*multiplier effects*), maka lapangan usaha industri pengolahan mempunyai dampak pengganda yang relatif tinggi (BPS DIY dan BAPPEDA DIY, 2012).

Tabel 4.24. Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DIY Menurut Sektor, 2011-2015 (%)

Sektor	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pertanian	26,17	27,82	28,18	25,42	23,08
2 Pertambangan, Listrik, Gas dan Air Minum	0,92	0,86	0,77	0,29	0,96
3 Industri Pengolahan	14,68	14,97	13,36	14,91	14,61
4 Konstruksi	7,30	6,92	5,54	4,84	8,19
5 Perdagangan, Hotel, dan Restoran	25,76	24,52	25,87	26,64	25,67
6 Transportasi & Komunikasi	3,70	3,27	3,48	3,78	3,23
7 Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Js Perushn	2,74	3,06	2,87	3,37	3,00
8 Jasa-jasa	18,73	18,58	19,93	20,75	21,25
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah tenaga kerja (orang)	1.850.436	1.911.720	1.886.071	1.956.043	1.891.218

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah dari Sakernas)

Dengan melihat beberapa indikator tersebut di atas, maka lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor bisa dijadikan prioritas utama investasi. Hal ini karena lapangan usaha tersebut mempunyai ICOR yang relatif rendah dan serapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Prioritas investasi berikutnya adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan karena mempunyai ICOR yang relatif rendah, serapan tenaga kerja yang tinggi, dan kepemilikan sumber daya lahan dan air yang relatif memadai di DIY. Prioritas investasi selanjutnya adalah lapangan usaha industri pengolahan, meskipun angka ICOR relatif agak tinggi namun mempunyai serapan tenaga kerja yang tinggi (14,91%), dan dari hasil penghitungan Tabel *Input Output* Provinsi DIY 2010 mempunyai *forward* dan *backward linkages* yang relatif tinggi. Lapangan usaha jasa-jasa juga bisa menjadi prioritas investasi lainnya, karena mempunyai serapan tenaga kerja yang cukup tinggi pula meskipun lapangan usaha ini mempunyai angka ICOR yang relatif tinggi. Jika pertimbangan utamanya hanya nilai ICOR, maka lapangan

usaha jasa keuangan dan asuransi serta lapangan usaha penyediaan akomodasi bisa dijadikan pilihan dalam melakukan investasi di DIY.

Sebaliknya, lapangan usaha penggalian meskipun mempunyai nilai ICOR yang relatif rendah tidak direkomendasikan untuk menjadi pilihan prioritas investasi, karena DIY tidak menonjol dalam kepemilikan sumber daya alam tambang dan mineral. Perlu upaya bersama untuk melindungi lahan pertanian dan daerah aliran sungai (DAS) dari kerusakan lingkungan dan pencemaran (polusi). Demikian pula lapangan usaha listrik dan air bersih serta lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi juga bukan merupakan pilihan prioritas investasi yang *urgent* karena selain angka ICOR-nya relatif tinggi, juga lebih bersifat *capital intensive*. Namun untuk jangka panjang investasi untuk lapangan usaha ini tetap diperlukan karena outputnya diperlukan untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi.

Sedangkan jika dilihat dari skala usaha, investasi sebaiknya diprioritaskan pada skala usaha mikro dan kecil (UMK). Berdasarkan dari hasil Sensus Ekonomi 2006, mayoritas usaha di Provinsi DIY merupakan usaha mikro (82,08 %) dan usaha kecil (16,54%). Sedangkan jumlah usaha besar dan menengah (UMB) hanya mempunyai *share* kurang dari dua persen dari jumlah seluruh usaha di DIY.

Tabel 4.25. Sebaran Perusahaan/Usaha non-Pertanian di Provinsi DIY menurut Skala Usaha, 2006

Skala Usaha	Perusahaan/Usaha (Unit)		Tenaga Kerja (Orang)	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Usaha Besar	772	0,19	74.789	8,17
Usaha Menengah	4.699	1,16	68.486	7,48
Usaha kecil	66.728	16,54	217.483	23,77
Usaha Mikro	331.069	82,08	552.933	60,42
Unit Pembantu	80	0,02	1.405	0,15
Jumlah	403.348	100,00	915.096	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2008 (Diolah dari hasil Sensus Ekonomi 2006)

Jika dilihat secara spasial, jumlah perusahaan/usaha masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta (Tabel 4.26). Dari 403.348 perusahaan/usaha di DIY, sekitar 27,41 persen berada di Kabupaten Sleman, 24,87 persen berlokasi di Kabupaten Bantul, 18,68 persen di Kabupaten Gunungkidul, 16,51 persen di Kota Yogyakarta, dan hanya 12,53 persen di Kabupaten Kulonprogo. Investasi seharusnya diarahkan ke seluruh wilayah DIY

untuk mencapai pemerataan antar wilayah sesuai dengan potensi masing-masing. Melihat karakteristik unit usaha tersebut maka perlu upaya yang keras untuk mendorong peran investasi swasta dan rumah tangga.

Tabel 4.26. Jumlah Perusahaan/Usaha non-Pertanian menurut Kabupaten/ Kota dan Skala Usaha di DIY, 2006 (Unit)

Kabupaten/Kota	Skala Usaha				Unit Pembantu	Jumlah
	Besar	Menengah	Kecil	Mikro		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kulonprogo	41	193	5.311	45.010	0	50.555
	5,31	4,11	7,96	13,60	0,00	12,53
2. Bantul	112	1.028	15.320	83.822	32	100.314
	14,51	21,88	22,96	25,32	40,00	24,87
3. Gunungkidul	46	329	8.989	65.978	0	75.342
	5,96	7,00	13,47	19,93	0,00	18,68
4. Sleman	306	1.739	21.901	86.573	26	110.545
	39,64	37,01	32,82	26,15	32,50	27,41
5. Yogyakarta	267	1.410	15.207	49.686	22	66.592
	34,59	30,01	22,79	15,01	27,50	16,51
D.I. Yogyakarta	772	4.699	66.728	331.069	80	403.348
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2008 (Diolah dari hasil Sensus Ekonomi 2006)

Catatan: Angka dicetak miring adalah persentase.

4.6. Hubungan ICOR, GDI, GDS, LPE, dan Inflasi

Hubungan ICOR, Investasi Bruto (*Gross Domestic Investment*) dan Tabungan Bruto (*Gross Domestic Saving*) dapat diturunkan dari persamaan identitas model makro ekonomi berikut:

$$Y = C + G + I + (X - M)$$

keterangan:

Y = Pendapatan Nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB)

C = Konsumsi Rumah Tangga

G = Konsumsi Pemerintah

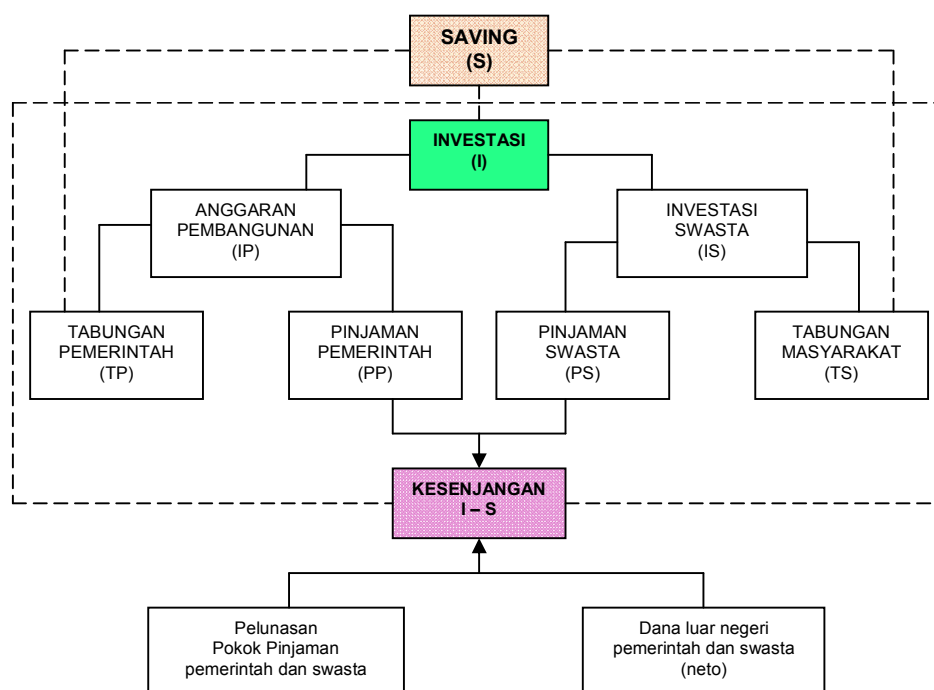
I = Investasi

X = Ekspor

M = Impor

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dikatakan bahwa Pendapatan Nasional (PDB) suatu negara atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah digunakan untuk konsumsi rumah tangga (C), konsumsi pemerintah (G), investasi (I), dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor/ $X - M$). Secara teori, rasio investasi (I) terhadap PD(R)B (Y) mencerminkan porsi investasi domestik bruto (*gross domestic investment/GDI*); sedangkan rasio tabungan (S) terhadap PD(R)B (Y) mencerminkan porsi tabungan domestik bruto (*gross domestic saving/GDS*), di mana tabungan sama dengan investasi ditambah ekspor neto $\{I+(X-M)\}$.

Untuk mengetahui kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan dapat dilihat pada Gambar 4.8. Teori **Two Gap Model** menunjukkan adanya **defisit** terhadap sumber pembiayaan pembangunan karena tabungan lebih kecil dari kebutuhan investasi ($I-S = \text{Resource Gap}$) (Widodo, 1990).



Sumber: Widodo, 1990

Gambar 4.8. Kesenjangan Investasi dan Tabungan

Dari Gambar 4.8 dapat diuraikan secara ringkas, bahwa investasi diperlukan untuk memenuhi anggaran pembangunan seperti yang tercantum dalam APBN(D) dan keperluan investasi oleh swasta. Kebutuhan ini dibiayai dengan tabungan

pemerintah dalam APBN(D), jika belum mencukupi maka dipenuhi melalui pinjaman atau bantuan luar negeri. Selain itu juga dipenuhi dari tabungan masyarakat dan pinjaman swasta. Pinjaman pemerintah bersama-sama dengan pinjaman swasta inilah merupakan kesenjangan antara investasi dengan tabungan.

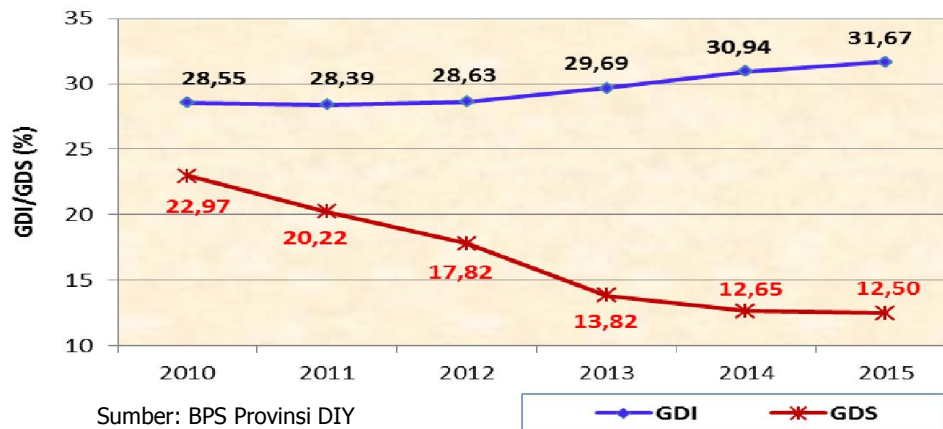
Kajian tentang hubungan antara angka ICOR dengan GDI, GDS, dan kaitannya dengan indikator pertumbuhan ekonomi serta tingkat inflasi dapat dilihat pada Tabel 4.27 berikut. Ada beberapa kecenderungan utama dari perkembangan indikator di atas. Pertama, dari periode 2013 sampai dengan 2015 ICOR cenderung meningkat yang berarti proses produksi semakin tidak efisien. Kedua, Gross Domestic Investment juga cenderung meningkat, Hal ini merupakan sinyal yang cukup baik karena menunjukkan porsi PDRB yang diinvestasikan kembali semakin meningkat. Perkembangan Gross Domestic Saving juga cenderung menurun. Dengan kondisi GDI yang semakin meningkat dan GDS cenderung menurun, maka secara umum gap antara GDI dan GDS (*I-S Gap*) cenderung meningkat. Keadaan ini dapat diinterpretasikan bahwa porsi pembiayaan investasi dari luar DIY cenderung meningkat. Semakin besar *I-S gap* akan semakin besar pula porsi nilai tambah yang akan mengalir dari luar DIY. Sebagai bukti empiris di lapangan pembangunan hotel-hotel besar, mall atau super mall kemungkinan besar investasinya berasal dari luar DIY. Ketiga, ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi DIY semakin melambat selama periode 2013-2014 dari 5,47 persen pada tahun 2013 menjadi 5,16 persen pada tahun 2014 dan kembali melambat pada tahun 2015 menjadi 4,94 persen. Keadaan ini merupakan indikasi yang kurang baik dimana selama dua tahun terakhir pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Keempat, tingkat inflasi cenderung pada level di bawah ambang psikologis (*double digit*).

Tabel 4.27. Hubungan ICOR, GDI, GDS, LPE dan Inflasi di Provinsi DIY, 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ICOR	5,66	5,48	5,36	5,71	5,92
GDI	28,39	28,63	29,69	30,94	31,67
GDS	20,22	17,82	13,82	12,65	12,50
LPE	5,21	5,37	5,47	5,16	4,94
IS-Gap(%)	8,16	10,81	15,87	18,29	19,17
Nominal IS-Gap (miliar Rp.)	5.827	8.353	13.477	16.982	19.436
INFLASI	3,88	4,31	7,32	6,59	3,09

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara



Gambar 4.9. Perkembangan GDI dan GDS di Provinsi DIY, 2010-2015

Untuk membiayai pembangunan wilayah diperlukan sejumlah investasi baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dari luar daerah. Pada tahun 2011 hingga 2015 kemampuan investasi DIY dengan dana sendiri mengalami penurunan, seperti ditunjukkan oleh gap GDI dan GDS yang cenderung melebar (Gambar 4.9). Untuk mengatasi kebutuhan investasi tersebut diperlukan investasi dari luar DIY, baik luar provinsi maupun luar negeri. Hal ini dapat tercapai jika iklim investasi di DIY lebih menarik dibandingkan daerah lainnya. Selain itu, perlu dipacu jiwa *entrepreneurship* dari angkatan muda DIY sehingga berani melakukan investasi yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan ikut menggerakkan roda perekonomian daerah.

Daya saing investasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan masuknya investasi ke daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Investor utama adalah kalangan dunia usaha. Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing investasi suatu daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi daya saing investasi antara lain: ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kelembagaan, serta infrastruktur diyakini merupakan beberapa faktor pembentuk daya saing investasi suatu negara atau daerah. Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)

membutuhkan adanya iklim usaha yang kondusif, kemudahan akses serta kejelasan prosedur perijinan dalam kegiatan investasi. Kondisi makro ekonomi daerah yang bersangkutan seperti tingkat bunga, aturan perpajakan, dan laju inflasi juga mempengaruhi iklim investasi daerah (Mankiw, 2007).

Keberhasilan daerah dalam meningkatkan daya saing investasi, salah satunya bergantung kepada kemampuan daerah tersebut dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal lainnya yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makro ekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam arti luas. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan lapangan usaha swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi.

Investasi membutuhkan iklim yang kondusif dan transparansi dalam hal legalitas pelayanan dan prosedur investasi. Daerah harus mampu membuat *business planning map* tentang peluang investasi daerahnya berdasarkan *feasibility-study* yang matang. Perlu dibentuk kawasan-kawasan investasi berdasarkan peruntukannya. Selain itu, juga diperlukan pembenahan kualitas dan kuantitas infrastruktur.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.2. Rekomendasi

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian tentang penghitungan ICOR di DIY selama periode 2011-2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Selama periode 2011-2015 pertumbuhan ekonomi DIY rata-rata mencapai 5,24 persen per tahun. Tiga lapangan usaha yang berkembang cukup pesat adalah jasa keuangan dan asuransi; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta informasi dan komunikasi dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 7,80 persen, 7,74 persen, dan 7,03 persen per tahun
2. Investasi di DIY selama periode pengamatan terus meningkat dan pada tahun 2015 mencapai Rp. 32,12 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp 23,26 triliun atas dasar harga konstan 2010. Ditinjau dari sisi spasial, investasi terbesar terjadi di Kabupaten Sleman dengan kontribusi sekitar 40,46 persen kemudian diikuti oleh Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo dengan kontribusi masing-masing 23,82 persen, 15,53 persen, 12,42 persen, dan 7,77 persen. Sedangkan jika ditinjau menurut lapangan usaha, 5 (lima) aktivitas ekonomi yang memberikan sumbangan terbesar secara berturut-turut adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi sekitar 14,96 persen; kemudian diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 12,63 persen; transportasi dan pergudangan sebesar 11,49 persen; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9,77 persen; dan jasa pendidikan sebesar 9,73 persen. Sementara lapangan usaha yang lain sumbangannya kurang dari 8 persen.
3. Hasil penghitungan ICOR Total DIY pada tahun 2015 sebesar 5,92. Angka ICOR ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,71. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mencapai 4,94 persen, sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 5,16 persen. Jika dibandingkan dengan ICOR provinsi di kawasan Jabalnusra, DIY menempati urutan tertinggi ke-tiga setelah Provinsi Nusa tenggara Timur dan DKI Jakarta.

4. Hasil penghitungan ICOR baik dengan metode standar maupun akumulasi, dengan dan tanpa memperhitungkan perubahan inventori menghasilkan angka yang tidak jauh berbeda. Lapangan usaha dengan ICOR di bawah 5 yaitu: pertanian, kehutanan, dan perikanan; jasa keuangan dan asuransi; pertambangan dan penggalan; perdagangan; real estate; serta konstruksi. Sementara lapangan usaha dengan ICOR di atas 10 adalah pengadaan listrik dan gas serta transportasi dan pergudangan.
5. Dalam periode 2011-2015, rata-rata ICOR tertinggi terjadi di Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar 6,51. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta dengan nilai ICOR masing-masing sebesar 6,41; 5,65; 4,72; dan 3,80.
6. Kebutuhan investasi semakin meningkat dengan meningkatnya target pertumbuhan ekonomi dan tingginya laju inflasi. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,38 persen pada tahun 2016, 5,58 persen pada tahun 2018, dan 5,82 persen pada tahun 2020, DIY membutuhkan investasi masing-masing sebesar 37,22 triliun rupiah, 48,87 triliun rupiah, dan 64,80 triliun rupiah. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulonprogo sebesar 5,04 persen (2016), 5,42 persen (2018), dan 5,80 persen (2020) diperlukan tambahan investasi masing-masing sebesar Rp. 2,94 triliun, Rp. 3,91 triliun, dan Rp. 5,22 triliun. Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul sebesar 5,44 persen (2016), 5,68 persen (2018), dan 5,92 persen (2020). Untuk mencapai target tersebut diperlukan tambahan investasi sebesar Rp. 5,67 triliun (2016), Rp. 7,37 triliun (2018) dan Rp. 9,61 triliun (2020). Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen (2016), 5,34 persen (2018), dan 5,74 persen (2020), Kabupaten Gunungkidul membutuhkan investasi masing-masing sebesar Rp. 4,60 triliun, Rp. 6,13 triliun, dan Rp. 8,30 triliun. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman sebesar 5,40 persen (2016), 5,50 persen (2018), dan 5,60 persen (2020) diperlukan tambahan investasi masing-masing sebesar Rp. 14,27 triliun, Rp. 18,40 triliun, dan Rp. 23,76 triliun. Target pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta sebesar 5,59 persen (2016), 5,77 persen (2018), dan 6,05 persen (2020). Untuk mencapai target tersebut diperlukan tambahan investasi sebesar Rp. 6,85 triliun (2016), Rp. 8,90 triliun (2018) dan Rp. 11,80 triliun (2020).

7. Gross Domestic Investment (GDI) selama periode 2011-2015 cenderung meningkat dan Gross Domestic Saving (GDS) cenderung menurun, sehingga gap antara GDI dan GDS (*I-S Gap*) cenderung meningkat.

5.2. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DIY perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Di Provinsi DIY, gap antara investasi dan tabungan semakin melebar dari tahun ke tahun dan peran pemerintah dalam pembentukan investasi tidak cukup besar. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, diperlukan investasi dari luar DIY. Selain itu perlu ditingkatkan peran swasta, rumah tangga, dan BUMN/BUMD dalam pembentukan investasi di DIY. Dalam hal ini Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan perannya sebagai fasilitator dan dinamisor pembangunan di wilayahnya.
2. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat diperlukan beberapa pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi yang akan dilakukan antara lain tingkat efisiensi investasi dan kesempatan kerja.
3. Dengan mempertimbangkan masih tingginya ketimpangan investasi antar kabupaten/kota, investasi di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul perlu didorong lebih kuat lagi dengan kebijakan investasi dan pembiayaan yang memadai agar tidak semakin tertinggal.
4. Pertimbangan untuk investasi sebaiknya menggunakan berbagai macam indikator, seperti: tingkat efisiensi, serapan tenaga kerja, keterkaitan ke hulu dan ke hilir (*backward* dan *forward linkages*), dan kepemilikan sumber daya dari daerah setempat (*resource endowment*). Dengan mempertimbangkan beberapa indikator tersebut di atas, maka lapangan usaha perdagangan bisa dijadikan prioritas utama investasi. Hal ini karena sektor tersebut mempunyai ICOR terendah dan serapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Sementara itu, untuk pengembangan subkategori penyediaan akomodasi meskipun nilai ICOR-nya relatif kecil diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif. Subkategori ini merupakan sarana pendukung untuk

pengembangan pariwisata di DIY namun perlu diperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan serta adanya kebijakan pemerintah daerah tentang moratorium pembangunan hotel di DIY. Prioritas investasi berikutnya adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan karena mempunyai ICOR yang relatif rendah, serapan tenaga kerja yang tinggi, dan kepemilikan sumber daya lahan dan air yang cukup tersedia di DIY. Mengingat lahan dan air merupakan faktor produksi utama dalam pengembangan sektor pertanian, maka diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah yang tegas untuk mengendalikan laju konversi lahan pertanian terutama lahan pertanian yang produktif. Prioritas investasi selanjutnya adalah kategori industri pengolahan, meskipun angka ICOR-nya relatif agak tinggi namun mempunyai serapan tenaga kerja yang tinggi, dan dari hasil penghitungan Tabel *Input Output* DIY 2010 mempunyai *backward* dan *forward linkages* yang relatif tinggi. Prioritas investasi bisa dilakukan pada kategori jasa keuangan dan asuransi yang mempunyai nilai ICOR relatif rendah serta laju pertumbuhan yang relatif tinggi selama lima tahun terakhir. Kategori Informasi dan komunikasi meskipun mempunyai nilai ICOR relatif tinggi, namun perkembangannya cukup pesat sehingga bisa dijadikan pilihan berikutnya untuk melakukan investasi. DIY merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Untuk menentukan sektor-sektor prioritas untuk investasi dengan tepat perlu dilakukan studi lebih lanjut.

5. Mengingat nilai ICOR yang masih cukup tinggi dan dominasi usaha mikro kecil pada struktur usaha di DIY maka perlu rekayasa teknologi tepat guna yang efisien dan efektif yang bisa diadopsi oleh kalangan pengusaha mikro kecil sehingga proses produksi mereka menjadi semakin efisien. Selain itu diperlukan pembinaan manajerial dalam pembiayaan, pengelolaan usaha, dan informasi pasar. Perlu dibangun semangat kewirausahaan bagi masyarakat DIY.
6. Untuk meningkatkan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di DIY, Pemerintah DIY perlu meningkatkan pelayanan, promosi, deregulasi, dan kebijakan-kebijakan yang kondusif seperti: transparansi, kemudahan, serta percepatan dalam hal pelayanan dan prosedur perijinan, penghapusan *high cost economy*; jaminan situasi politik, sosial, keamanan yang lebih stabil; serta promosi investasi yang lebih intensif.
7. Pemerintah daerah harus mampu membuat *business planning map* tentang peluang investasi berdasarkan *feasibility-study* yang matang dan membentuk

kawasan-kawasan investasi berdasarkan peruntukannya. Diperlukan juga pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, seperti infrastruktur jalan dan jembatan yang sesuai dengan kebutuhan investor, *supply* listrik dan air yang cukup, dan akses ke bandara atau pelabuhan yang lebih mudah.

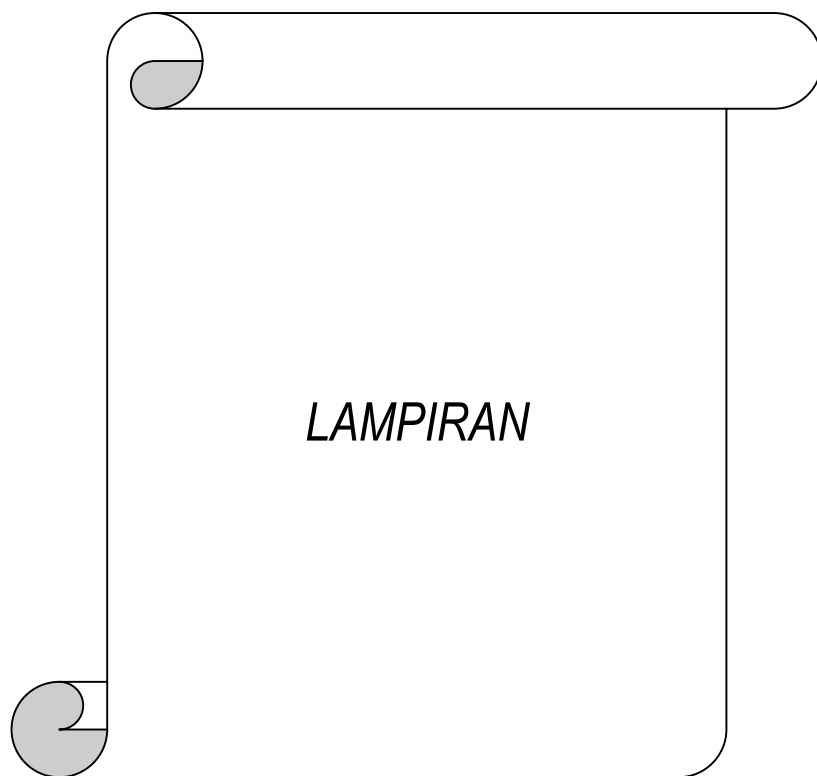
8. Perlu dukungan dari berbagai instansi seperti kepolisian untuk masalah keamanan; aparat hukum untuk kepastian hukum; dan birokrasi terhadap kelembagaan yang menjalankan otoritas fungsi investasi seperti BKPM. Selain itu juga perlu dukungan bank-bank komersial untuk memperoleh kredit dan akses kredit semakin mudah bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) seperti petani, nelayan dan industri kecil.
9. Sektor pertanian diharapkan tetap dijaga pertumbuhan dan kontribusinya guna menekan inflasi dan menjaga stabilitas di masyarakat, serta tersedianya input bagi lapangan usaha lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1988. Ekonomi Pembangunan. Edisi Pertama. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- BPKP. 2007. Ekonomi Makro. Bogor
- BPS. 2004. Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri Pengolahan Tahun 1990-2002. Jakarta
- BPS DIY. 2007. Analisis Profil Perusahaan/Usaha Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2006. Hasil Listing Sensus Ekonomi 2006. Yogyakarta
- BPS DIY. 2015. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DIY Menurut lapangan Usaha 2010-2014. Yogyakarta.
- BPS DIY. 2015. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DIY Menurut Pengeluaran 2010-2014. Yogyakarta.
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2003. ICOR Sektorial Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 1998-2002. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2009. ICOR Sektorial Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2004-2008. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2010. ICOR Sektorial Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2005-2009. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2011. Analisis Pembentukan Investasi Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2011. ICOR Sektorial Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2006-2010. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2012. Analisis ICOR Sektorial Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2007-2011. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2012. Tabel Input-Output Daerah Istimewa Yogyakarta 2010. Yogyakarta.
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2013. Analisis ICOR Sektorial Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2008-2012. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2014. Analisis ICOR Sektorial Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2009-2013. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2015. Analisis ICOR Sektorial Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2014. Yogyakarta
- Effendi, D.P. 1992. ICOR. Stok Kapital. dan ILOR. BPS. Jakarta

- Glassburner, B dan A. Chandra. 1979. Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro. LP3ES. Jakarta
- Hess, P. and C. Ross. 1997. Economic Development; Theories. Evidence. and Policies. The Dryden Press. Orlando.
- Mankiw, N.G. 2007. Macroeconomics. Sixth Edition. Terjemahan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Salim, A. 2010. Pengembangan Investasi Daerah: Agenda Pemerintah Daerah. diakses dari <http://agusjero.blogspot.com/2010/09/pengembangan-investasi-daerah-agenda.html>
- Sutomo, S. 2015. Sistem Data dan Perangkat Analisis Ekonomi Makro. Corleone Books – Publishing House of Litera Media. Bandung.
- Tjokroamidjojo, B. 1976. Perencanaan Pembangunan. Gunung Agung. Jakarta
- Widodo, Hg.S.T. 1990. Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Kanisius. Yogyakarta



Lampiran 1. PDRB Provinsi DIY atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	7.805.134	8.640.412	9.449.020	9.769.112	10.848.369
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	6.859.580	7.632.052	8.347.274	8.545.055	9.493.601
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	684.674	707.784	750.208	816.386	906.421
c. Perikanan	260.881	300.576	351.538	407.671	448.346
2. Pertambangan & Penggalian	455.990	467.147	495.039	537.599	573.133
3. Industri Pengolahan	10.280.007	10.242.468	11.563.734	12.614.921	13.236.292
4. Pengadaan Listrik & Gas	91.001	90.992	86.394	89.669	92.610
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	79.885	83.130	89.645	102.670	109.697
6. Konstruksi	6.786.011	7.350.632	8.060.750	8.722.682	9.499.917
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	5.812.824	6.413.319	6.938.421	7.681.035	8.342.646
8. Transportasi & Pergudangan	3.922.584	4.256.792	4.783.127	5.313.233	5.755.748
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6.457.190	7.203.278	8.284.061	9.323.242	10.383.391
a. Penyediaan Akomodasi	1.176.742	1.395.507	1.665.470	1.813.581	2.050.478
b. Penyediaan Makan Minum	5.280.448	5.807.771	6.618.590	7.509.661	8.332.913
10. Informasi & Komunikasi	6.700.373	7.331.839	7.572.219	7.897.507	8.244.242
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2.412.033	2.696.113	3.170.933	3.602.561	4.028.358
a. Jasa Perantara Keuangan	1.699.454	1.928.290	2.342.862	2.702.048	3.058.441
b. Lainnya	712.578	767.823	828.071	900.513	969.917
12. Real Estate	4.891.401	5.429.459	5.815.245	6.497.271	7.143.655
13. Jasa Perusahaan	783.186	836.060	855.439	956.391	1.048.359
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5.223.332	5.931.304	6.702.819	7.492.246	8.348.234
15. Jasa Pendidikan	6.050.414	6.364.492	6.816.002	7.600.855	8.598.744
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1.749.193	1.928.468	2.094.674	2.276.361	2.553.551
17. Jasa lainnya	1.869.401	1.981.955	2.147.020	2.351.975	2.589.171
PDRB	71.369.958	77.247.861	84.924.543	92.829.330	101.396.117

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 2. Distribusi Persentase PDRB Provinsi DIY atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (%)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	10,94	11,19	11,13	10,52	10,70
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	9,61	9,88	9,83	9,21	9,36
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	0,96	0,92	0,88	0,88	0,89
c. Perikanan	0,37	0,39	0,41	0,44	0,44
2. Pertambangan & Penggalian	0,64	0,60	0,58	0,58	0,57
3. Industri Pengolahan	14,40	13,26	13,62	13,59	13,05
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,13	0,12	0,10	0,10	0,09
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
6. Konstruksi	9,51	9,52	9,49	9,40	9,37
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	8,14	8,30	8,17	8,27	8,23
8. Transportasi & Pergudangan	5,50	5,51	5,63	5,72	5,68
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	9,05	9,32	9,75	10,04	10,24
a. Penyediaan Akomodasi	1,65	1,81	1,96	1,95	2,02
b. Penyediaan Makan Minum	7,40	7,52	7,79	8,09	8,22
10. Informasi & Komunikasi	9,39	9,49	8,92	8,51	8,13
11. Jasa Keuangan & Asuransi	3,38	3,49	3,73	3,88	3,97
a. Jasa Perantara Keuangan	2,38	2,50	2,76	2,91	3,02
b. Lainnya	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96
12. Real Estate	6,85	7,03	6,85	7,00	7,05
13. Jasa Perusahaan	1,10	1,08	1,01	1,03	1,03
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	7,32	7,68	7,89	8,07	8,23
15. Jasa Pendidikan	8,48	8,24	8,03	8,19	8,48
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,45	2,50	2,47	2,45	2,52
17. Jasa lainnya	2,62	2,57	2,53	2,53	2,55
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 3. PDRB Provinsi DIY atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	7.134.679	7.500.728	7.670.026	7.508.980	7.703.978
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	6.241.690	6.588.237	6.741.415	6.539.528	6.703.079
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	651.122	654.158	657.700	680.933	700.237
c. Perikanan	241.866	258.333	270.911	288.519	300.662
2. Pertambangan & Penggalian	436.329	443.627	461.014	470.735	471.323
3. Industri Pengolahan	9.711.792	9.435.888	10.084.213	10.469.637	10.652.525
4. Pengadaan Listrik & Gas	100.059	110.270	116.969	121.268	119.663
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	76.349	78.992	79.740	82.855	85.260
6. Konstruksi	6.483.267	6.772.476	7.106.855	7.508.543	7.826.701
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	5.410.097	5.878.432	6.187.855	6.540.108	6.944.903
8. Transportasi & Pergudangan	3.795.545	3.975.070	4.217.507	4.377.850	4.541.309
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6.066.532	6.480.399	6.942.541	7.414.021	7.842.132
a. Penyediaan Akomodasi	1.063.073	1.188.626	1.289.747	1.353.394	1.450.425
b. Penyediaan Makan Minum	5.003.459	5.291.773	5.652.794	6.060.627	6.391.707
10. Informasi & Komunikasi	6.775.394	7.503.158	7.969.970	8.458.713	8.891.145
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2.268.273	2.341.598	2.610.919	2.826.934	3.060.733
a. Jasa Perantara Keuangan	1.608.304	1.652.024	1.898.022	2.086.229	2.273.369
b. Lainnya	659.969	689.574	712.897	740.705	787.363
12. Real Estate	4.699.363	5.116.888	5.322.004	5.735.457	6.105.126
13. Jasa Perusahaan	769.963	831.517	858.734	924.042	991.564
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	4.999.227	5.373.904	5.639.412	5.971.986	6.281.580
15. Jasa Pendidikan	5.841.702	6.148.737	6.430.386	6.938.845	7.444.277
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1.640.479	1.791.076	1.916.374	2.062.979	2.210.406
17. Jasa lainnya	1.840.824	1.919.689	2.012.931	2.119.326	2.288.950
PDRB	68.049.874	71.702.449	75.627.450	79.532.277	83.461.574

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 4. Distribusi Persentase PDRB Provinsi DIY atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (%)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	10,48	10,46	10,14	9,44	9,23
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	9,17	9,19	8,91	8,22	8,03
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	0,96	0,91	0,87	0,86	0,84
c. Perikanan	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
2. Pertambangan & Penggalian	0,64	0,62	0,61	0,59	0,56
3. Industri Pengolahan	14,27	13,16	13,33	13,16	12,76
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
6. Konstruksi	9,53	9,45	9,40	9,44	9,38
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	7,95	8,20	8,18	8,22	8,32
8. Transportasi & Pergudangan	5,58	5,54	5,58	5,50	5,44
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	8,91	9,04	9,18	9,32	9,40
a. Penyediaan Akomodasi	1,56	1,66	1,71	1,70	1,74
b. Penyediaan Makan Minum	7,35	7,38	7,47	7,62	7,66
10. Informasi & Komunikasi	9,96	10,46	10,54	10,64	10,65
11. Jasa Keuangan & Asuransi	3,33	3,27	3,45	3,55	3,67
a. Jasa Perantara Keuangan	2,36	2,30	2,51	2,62	2,72
b. Lainnya	0,97	0,96	0,94	0,93	0,94
12. Real Estate	6,91	7,14	7,04	7,21	7,31
13. Jasa Perusahaan	1,13	1,16	1,14	1,16	1,19
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	7,35	7,49	7,46	7,51	7,53
15. Jasa Pendidikan	8,58	8,58	8,50	8,72	8,92
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,41	2,50	2,53	2,59	2,65
17. Jasa lainnya	2,71	2,68	2,66	2,66	2,74
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 5. PDRB Provinsi DIY atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2011-2015 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	44.029.583	49.403.401	57.101.887	62.805.013	68.608.884
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	1.866.945	2.096.682	2.457.182	2.948.427	3.171.193
3. Konsumsi Pemerintah	11.039.650	11.982.950	13.629.834	15.347.428	16.947.017
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19.325.555	21.148.871	24.250.704	27.744.794	30.935.037
5. Perubahan Inventori/Stok	935.146	969.334	967.150	980.197	1.180.158
Investasi (4 + 5)	20.260.700	22.118.205	25.217.854	28.724.991	32.115.195
6. Ekspor Barang dan Jasa	35.989.268	40.254.421	44.788.868	52.453.603	58.497.743
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	41.816.188	48.607.799	58.265.387	69.435.740	77.933.753
PDRB	71.369.958	77.247.861	84.930.239	92.843.723	101.406.279

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 6. Distribusi Persentase PDRB Provinsi DIY atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2011-2015 (%)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	61,69	63,95	67,23	67,65	67,66
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2,62	2,71	2,89	3,18	3,13
3. Konsumsi Pemerintah	15,47	15,51	16,05	16,53	16,71
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	27,08	27,38	28,55	29,88	30,51
5. Perubahan Inventori/Stok	1,31	1,25	1,14	1,06	1,16
Investasi (4 + 5)	28,39	28,63	29,69	30,94	31,67
6. Ekspor Barang dan Jasa	50,43	52,11	52,74	56,50	57,69
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	58,59	62,92	68,60	74,79	76,85
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 7. PDRB Provinsi DIY atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2011-2015 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	40.922.551	43.559.244	45.670.009	47.991.757	50.329.799
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	1.742.473	1.897.631	2.095.397	2.317.123	2.384.374
3. Konsumsi Pemerintah	10.300.707	10.909.808	11.553.432	12.056.063	12.697.848
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	18.245.345	19.207.890	20.190.810	21.358.622	22.286.615
5. Perubahan Inventori/Stok	813.139	804.880	832.540	930.599	974.645
Investasi (4 + 5)	19.058.485	20.012.770	21.023.350	22.289.222	23.261.260
6. Ekspor Barang dan Jasa	32.623.458	35.527.171	37.531.260	40.089.136	41.975.091
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	36.597.799	40.204.176	42.245.998	45.211.023	47.184.598
PDRB	68.049.874	71.702.449	75.627.450	79.532.277	83.463.774

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 8. Distribusi Persentase PDRB Provinsi DIY atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2011-2015 (%)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	60,14	60,75	60,39	60,34	60,30
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2,56	2,65	2,77	2,91	2,86
3. Konsumsi Pemerintah	15,14	15,22	15,28	15,16	15,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	26,81	26,79	26,70	26,86	26,70
5. Perubahan Inventori/Stok	1,19	1,12	1,10	1,17	1,17
Investasi (4 + 5)	28,01	27,91	27,80	28,03	27,87
6. Ekspor Barang dan Jasa	47,94	49,55	49,63	50,41	50,29
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	53,78	56,07	55,86	56,85	56,53
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 9. PMTB ± Perubahan Inventori, ICOR, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, 2015

Provinsi	ADHK 2010 (Rp. Juta)		% thd PDRB		ICOR		LPE (%)
	PMTB	PMTB + Δ Inventori	PMTB	PMTB + Δ Inv.	PMTB	PMTB + Δ Inv.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DKI Jakarta	657.105.156	660.007.524	45,19	45,39	8,14	8,18	5,88
Jawa Barat	308.880.922	364.097.627	25,59	30,17	5,35	6,30	5,03
Jawa Tengah	231.341.138	235.958.212	28,68	29,25	5,56	5,67	5,44
DI Yogyakarta	22.286.615	23.261.260	26,70	27,87	5,67	5,92	4,94
Jawa Timur	364.481.010	394.365.503	27,38	29,62	5,30	5,74	5,44
Banten	109.262.389	110.326.110	29,69	29,98	5,83	5,88	5,37
Bali	41.397.444	41.573.634	32,06	32,19	5,63	5,65	6,04
Nusa Tenggara Barat	25.615.716	25.837.906	28,82	29,07	1,65	1,66	21,24
Nusa Tenggara Timur	26.044.480	26.718.022	45,84	47,02	9,60	9,85	5,02
Indonesia	2.916.601.631	3.029.449.540	32,49	33,75	7,10	7,38	4,79

Sumber: BPS (Diolah)

Lampiran 10. PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2011-2015 (juta rupiah)

Kabupaten/Kota/ Provinsi	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	5.246.146,78	5.475.148,20	5.741.660,29	6.002.787,18	6.281.566,39
Bantul	12.728.666,29	13.407.021,78	14.138.719,30	14.867.408,80	15.610.514,32
Gunungkidul	9.248.010,91	9.695.979,84	10.177.432,51	10.639.465,69	11.151.687,94
Sleman	22.645.851,85	23.957.112,76	25.367.414,23	26.740.537,10	28.159.673,94
Kota Yogyakarta	18.206.089,71	19.189.074,78	20.239.557,65	21.312.143,78	22.412.175,67
D I Y	68.049.874,44	71.702.449,18	75.627.449,59	79.532.277,40	83.461.574,49

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Lampiran 11. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi DIY 2011-2015, dan Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun 2011-2015 (persen)

Kabupaten/Kota/ Provinsi	2011	2012	2013	2014*)	2015**)	Rata-rata 2011-2015
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kulonprogo	4,23	4,37	4,87	4,55	4,64	4,61
2. Bantul	5,07	5,33	5,46	5,15	5,00	5,23
3. Gunungkidul	4,52	4,84	4,97	4,54	4,81	4,79
4. Sleman	5,42	5,79	5,89	5,41	5,31	5,60
5. Yogyakarta	5,84	5,40	5,47	5,30	5,16	5,33
D I Y	5,21	5,37	5,47	5,16	4,94	5,24

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: * angka sementara; ** angka sangat sementara

Lampiran 12. PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di Provinsi D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2015 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.579.969	2.843.403	3.535.657	2.855.879	45.039
2. Pertambangan dan Penggalan	109.892	125.530	188.772	147.413	1.041
3. Industri Pengolahan	918.052	2.896.661	1.284.019	4.539.798	3.658.132
4. Pengadaan Listrik dan Gas	4.474	17.322	8.245	25.326	37.974
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.522	16.193	23.521	17.198	42.035
6. Konstruksi	651.776	1.873.228	1.328.853	3.631.129	2.174.134
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	993.190	1.634.013	1.216.310	2.507.164	1.931.299
8. Transportasi dan Pergudangan	636.391	935.531	707.695	2.379.991	1.095.535
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	296.721	2.279.275	813.608	3.458.076	3.550.966
10. Informasi dan Komunikasi	382.517	1.411.574	963.598	2.731.067	2.799.356
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	255.816	549.349	322.775	1.115.223	1.787.494
12. Real Estate	256.044	1.262.118	474.734	2.629.348	2.519.071
13. Jasa Perusahaan	22.112	94.902	60.222	578.397	296.115
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	684.127	1.432.619	1.299.112	2.251.057	2.680.897
15. Jasa Pendidikan	461.611	1.372.466	876.367	3.346.592	2.535.454
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	112.613	354.915	277.851	791.284	1.016.645
17. Jasa lainnya	286.475	387.740	452.889	751.294	717.935
PDRB	7.662.301	19.486.839	13.834.228	33.756.236	26.889.124

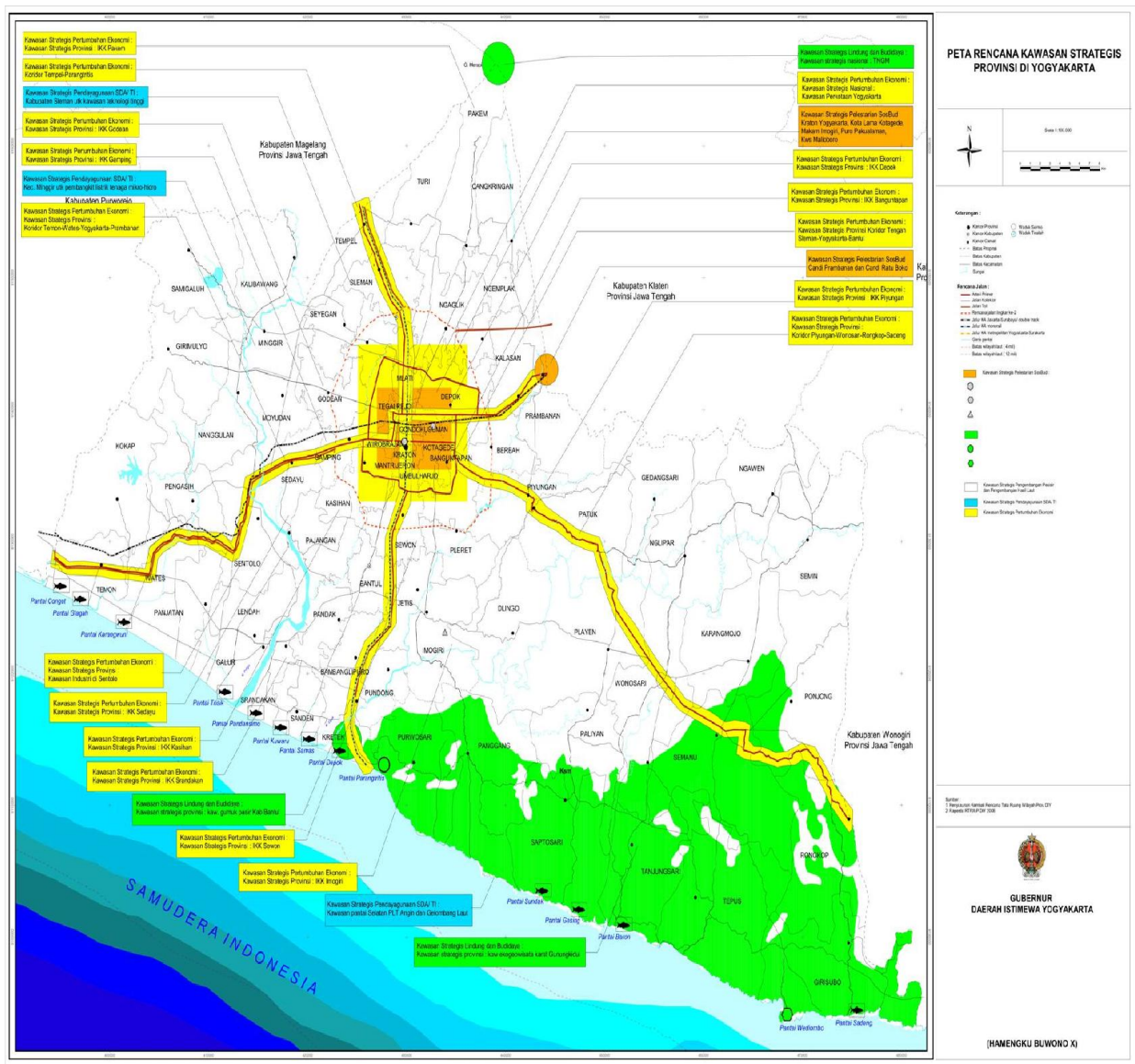
Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Lampiran 13. Kontribusi Lapangan Usaha Dominan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2011-2015 (persen)

Kabupaten/ Kota	Lapangan Usaha Dominan	Kontribusi		
		2011	2013	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,64	21,17	20,62
	2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	12,78	13,00	12,96
	3. Industri Pengolahan	12,88	12,03	11,98
Bantul	1. Industri Pengolahan	16,44	15,44	14,86
	2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,99	15,34	14,59
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,99	10,97	11,70
Gunungkidul	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,21	26,43	25,56
	2. Industri Pengolahan	10,07	9,42	9,28
	3. Konstruksi	9,32	9,62	9,61
Sleman	1. Industri Pengolahan	14,84	14,21	13,45
	2. Konstruksi	11,25	10,99	10,76
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,49	9,88	10,24
Yogyakarta	1. Industri Pengolahan	15,04	14,03	13,60
	2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,51	12,61	13,21
	3. Informasi dan Komunikasi	12,60	11,80	10,41

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Lampiran 14. Peta Rencana Kawasan Strategis di Provinsi D.I. Yogyakarta



Lampiran 15. Peta Pengembangan Kawasan Sentra Produksi DIY

